



**MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 2245 TAHUN 2025

TENTANG

**PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu disusun peta jabatan yang menggambarkan jumlah kebutuhan aparatur sipil negara untuk setiap jenjang jabatan;
 - b. bahwa Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 770 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
 5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
 7. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 598);
 8. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Peta Jabatan di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri/Kepala Badan ini.
- KEDUA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat informasi :
- a. susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional;
 - b. kedudukan jabatan dalam unit kerja secara vertikal dan horizontal; dan
 - c. jumlah kebutuhan aparatur sipil negara untuk setiap jabatan,
- pada unit kerja di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- KETIGA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan dalam penataan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri/Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 770 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri/Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2025

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,



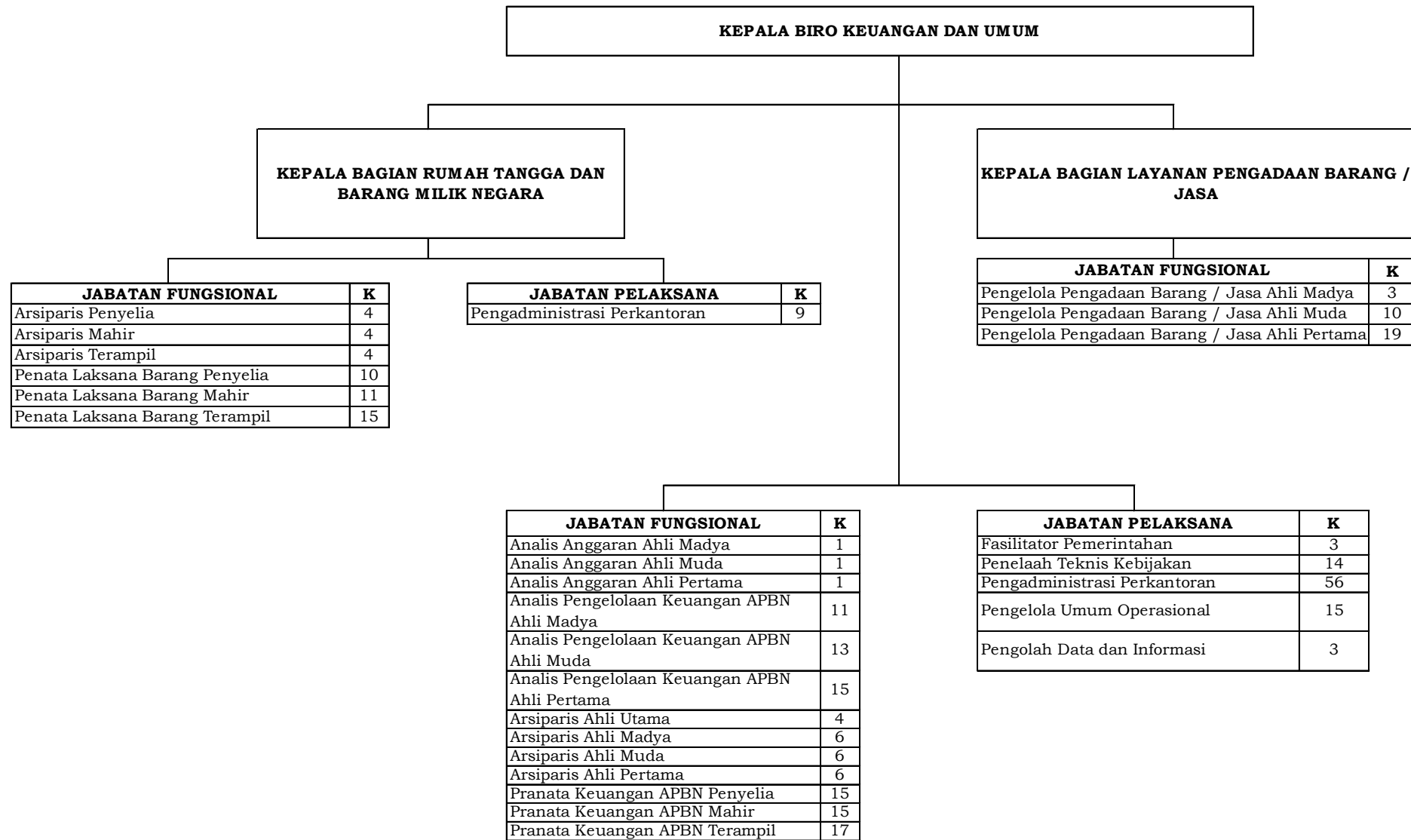
Mukhtarudin
MUKHTARUDIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA
 MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN
 PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 2245 TAHUN
 2025
 TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
 INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA
 MIGRAN INDONESIA.

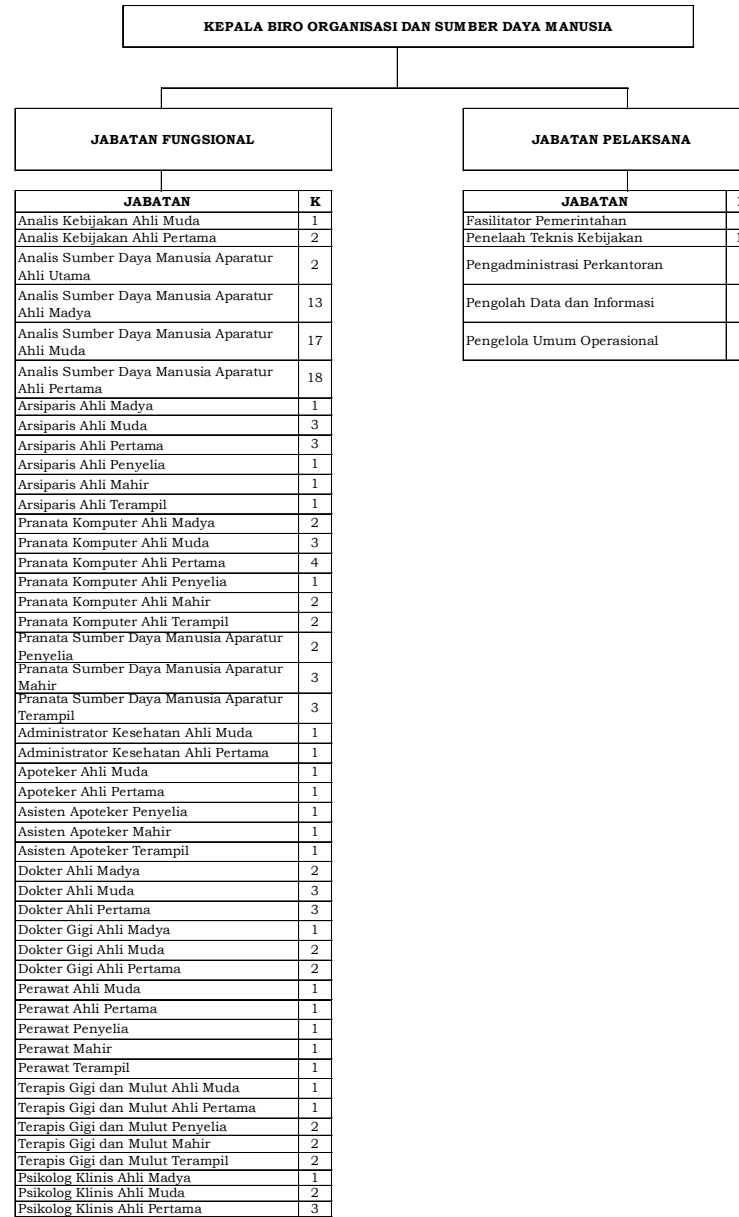
I. PETA JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
 A. BIRO MANAJEMEN KINERJA DAN KERJA SAMA



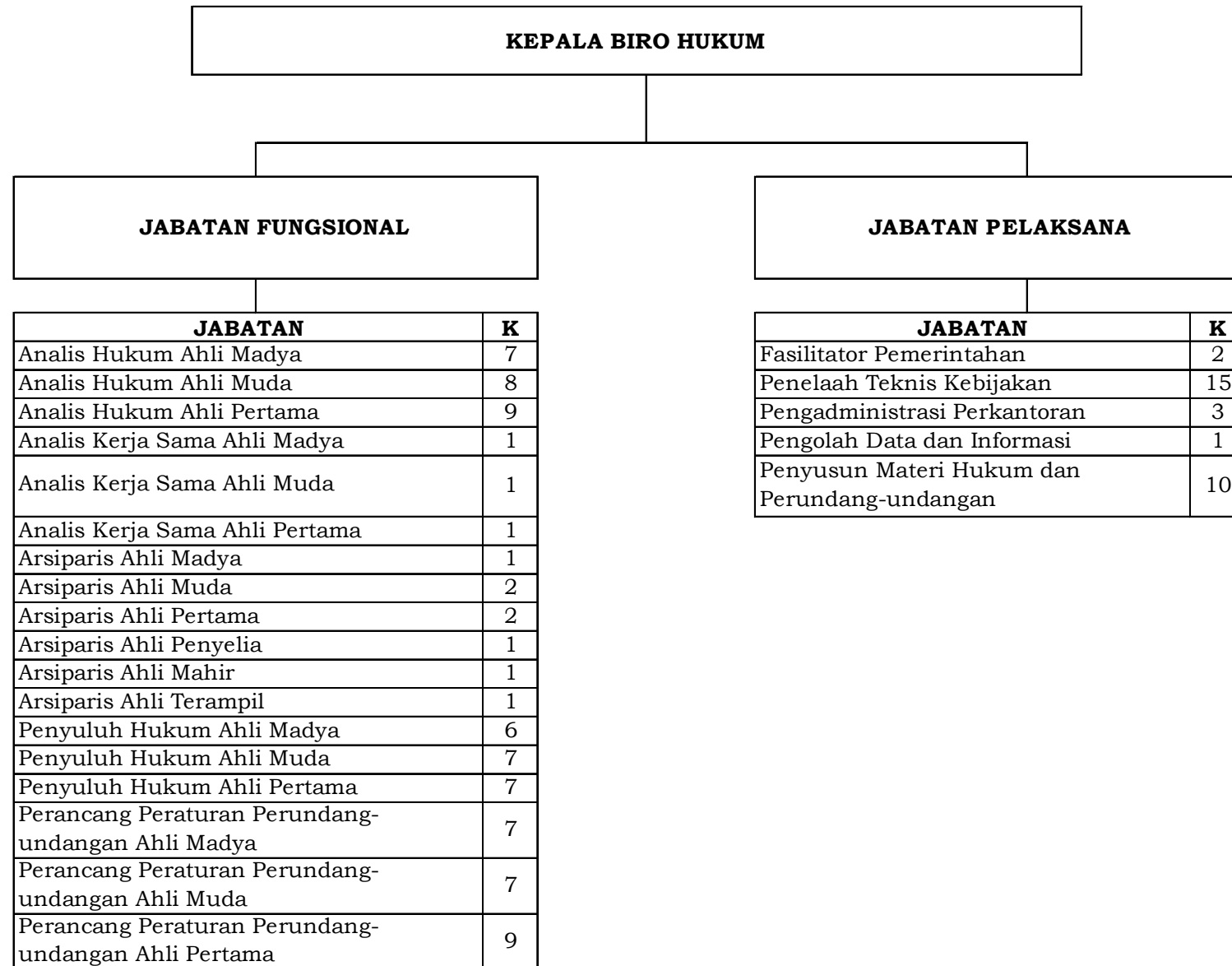
B. BIRO KEUANGAN DAN UMUM



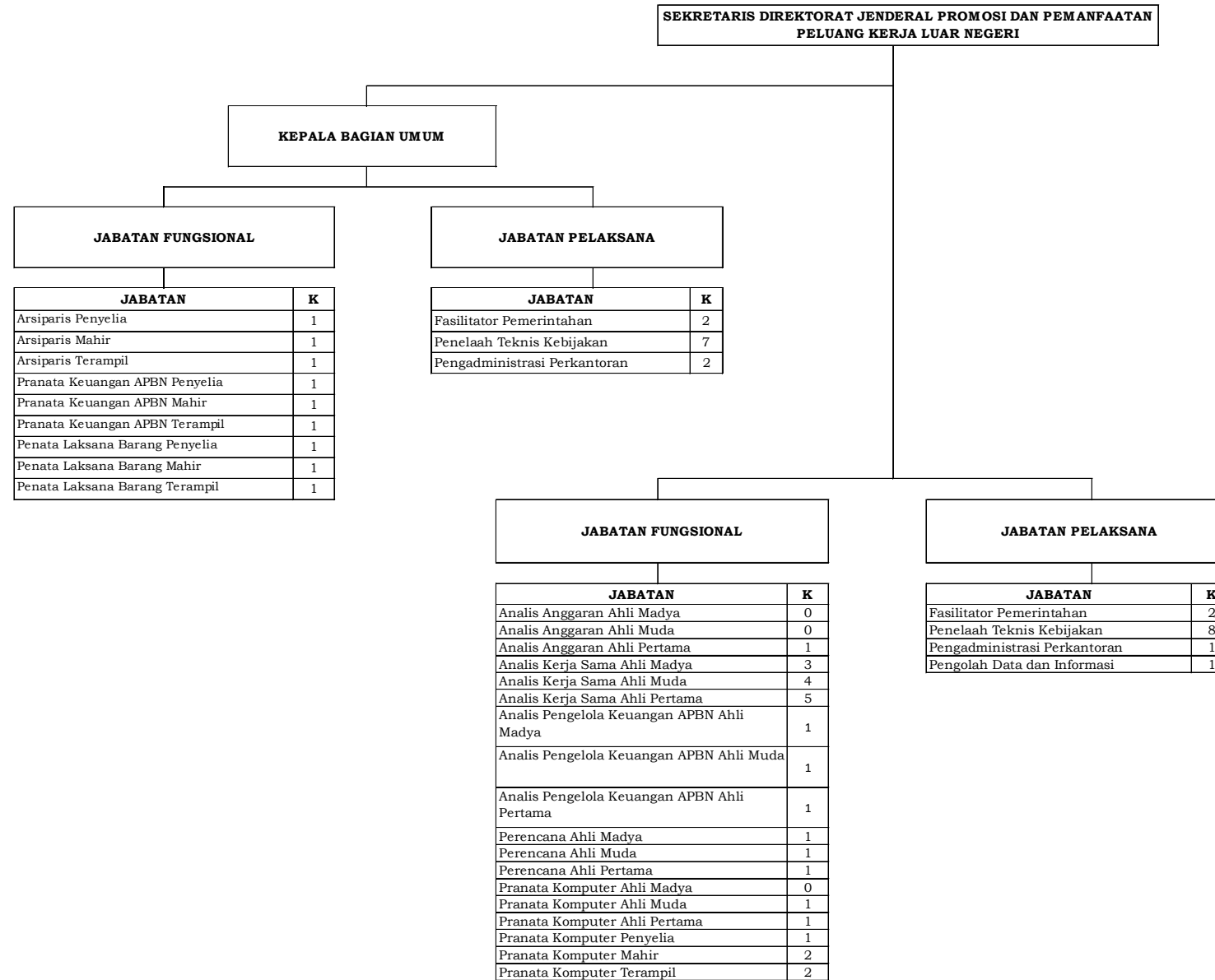
C. BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA



D. BIRO HUKUM



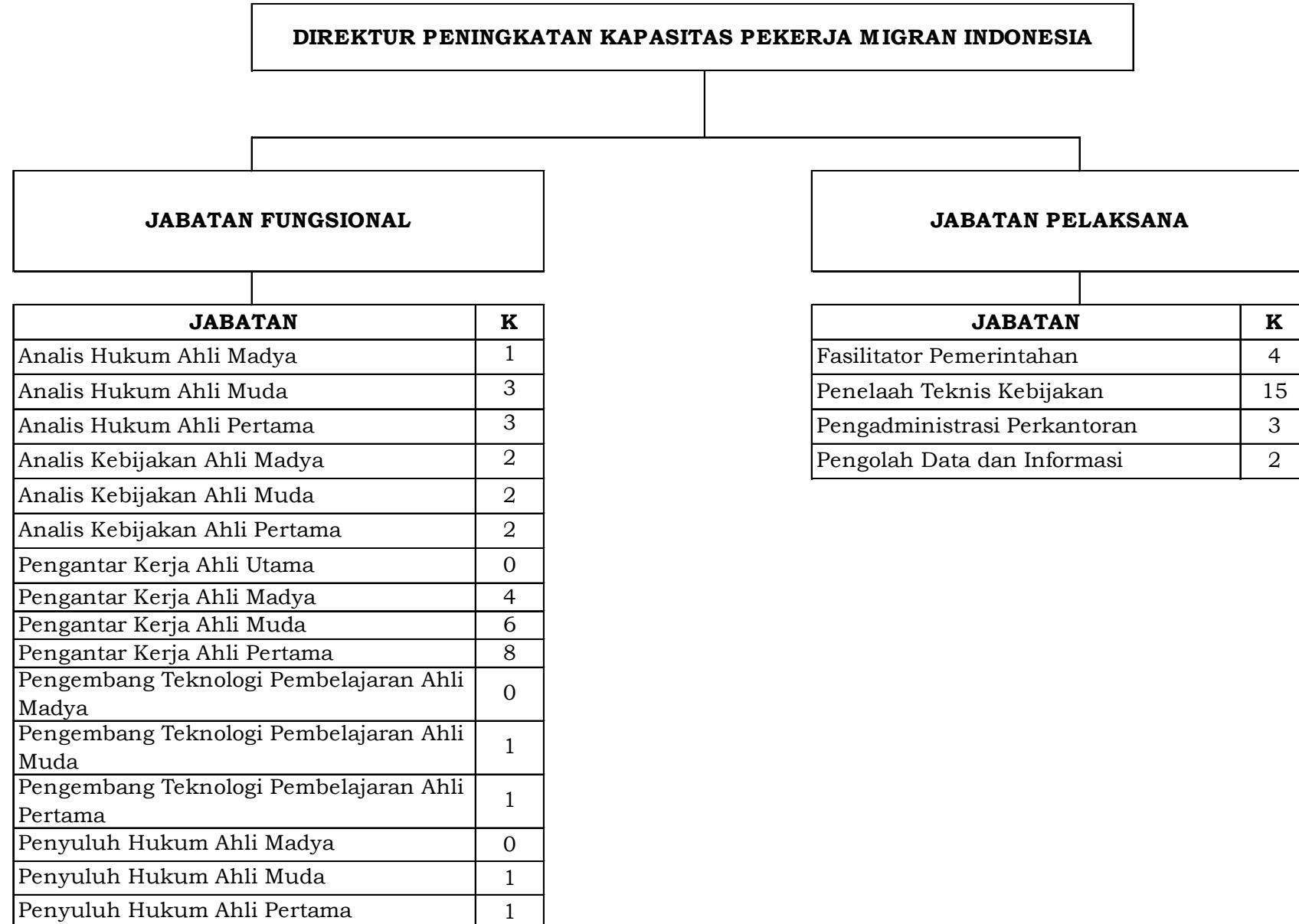
II. PETA JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PROMOSI DAN PEMANFAATAN PELUANG KERJA LUAR NEGERI
 A. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PROMOSI DAN PEMANFAATAN PELUANG KERJA LUAR NEGERI



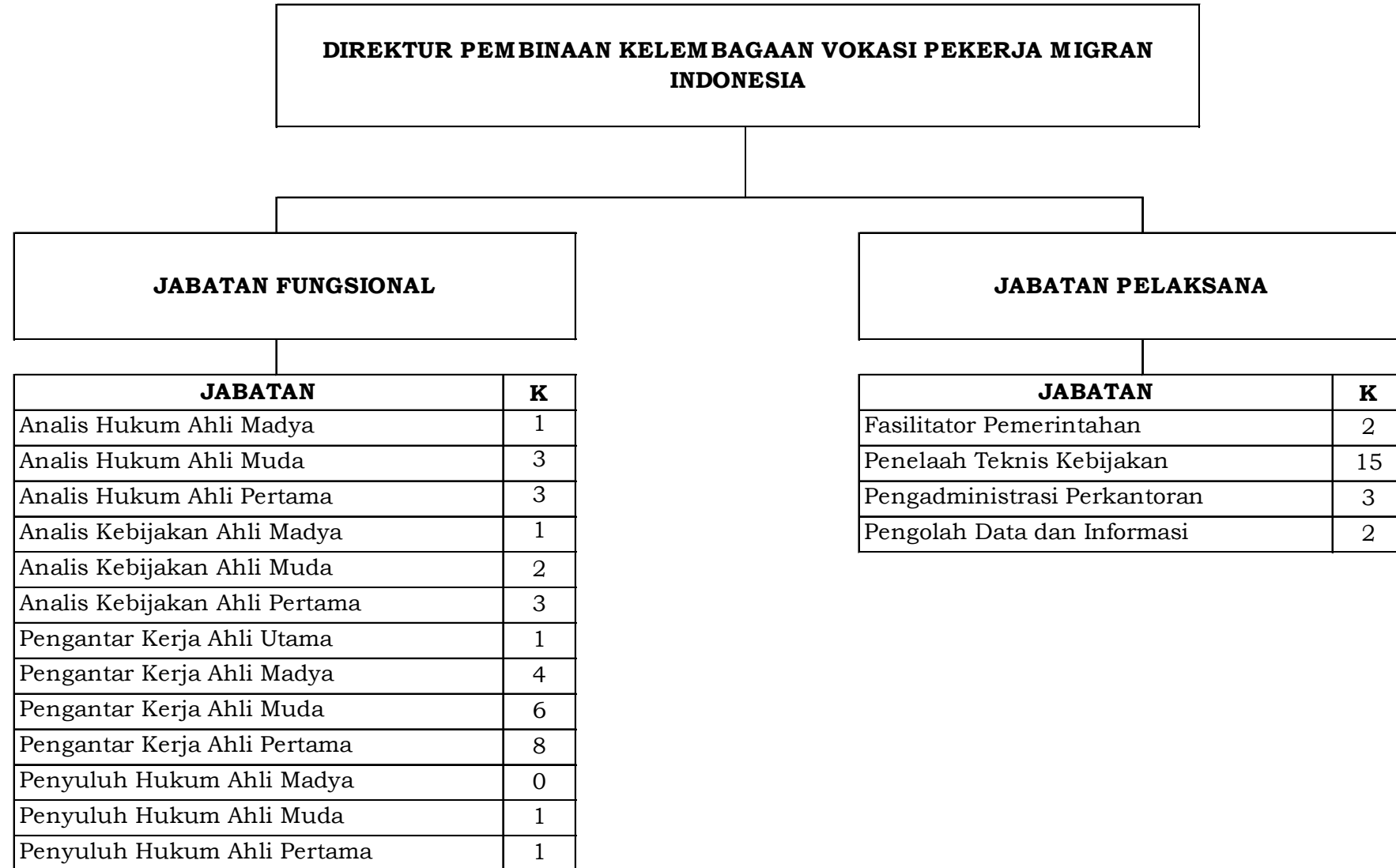
B. DIREKTORAT PEMETAAN PASAR KERJA LUAR NEGERI



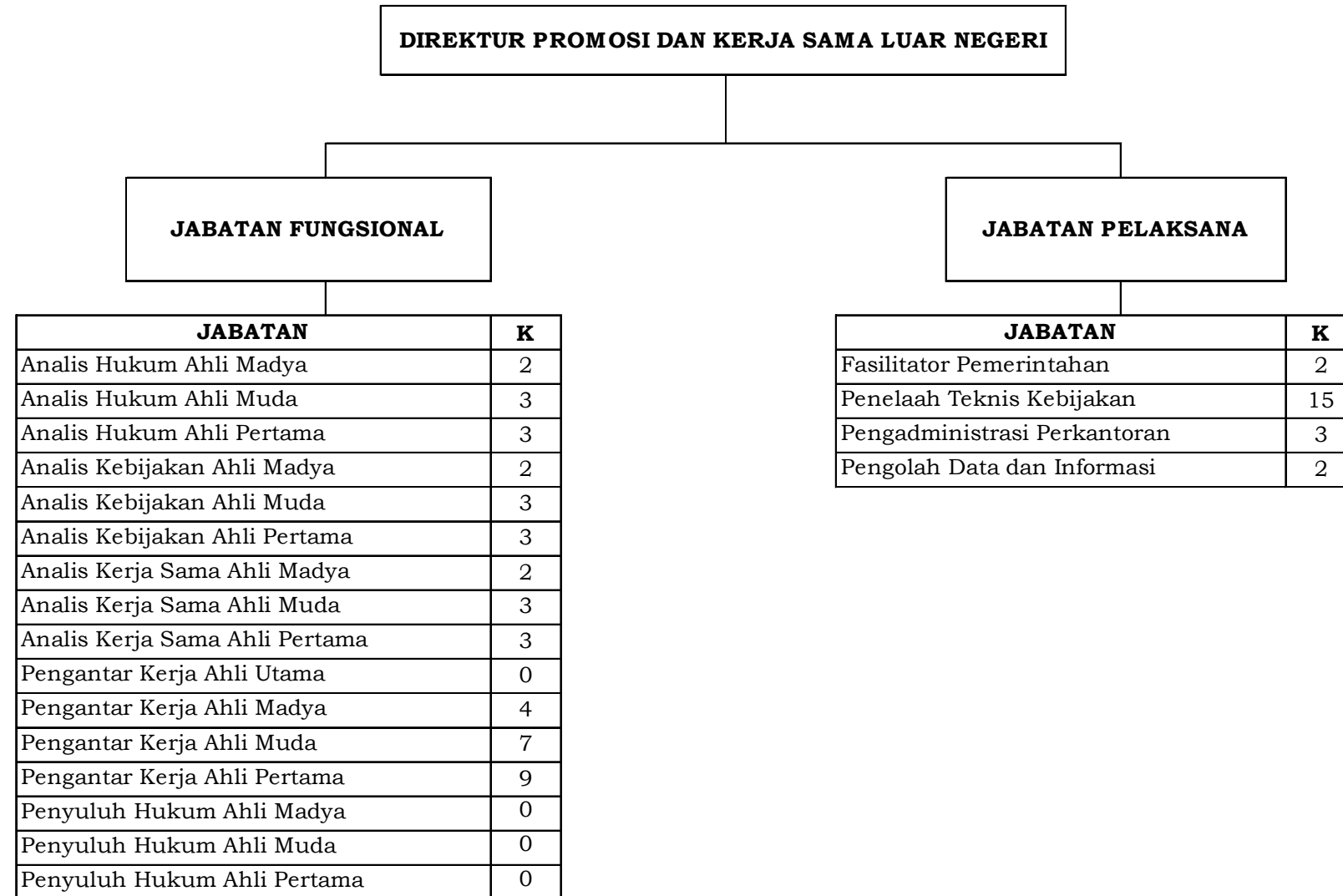
C. DIREKTORAT PENINGKATAN KAPASITAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA



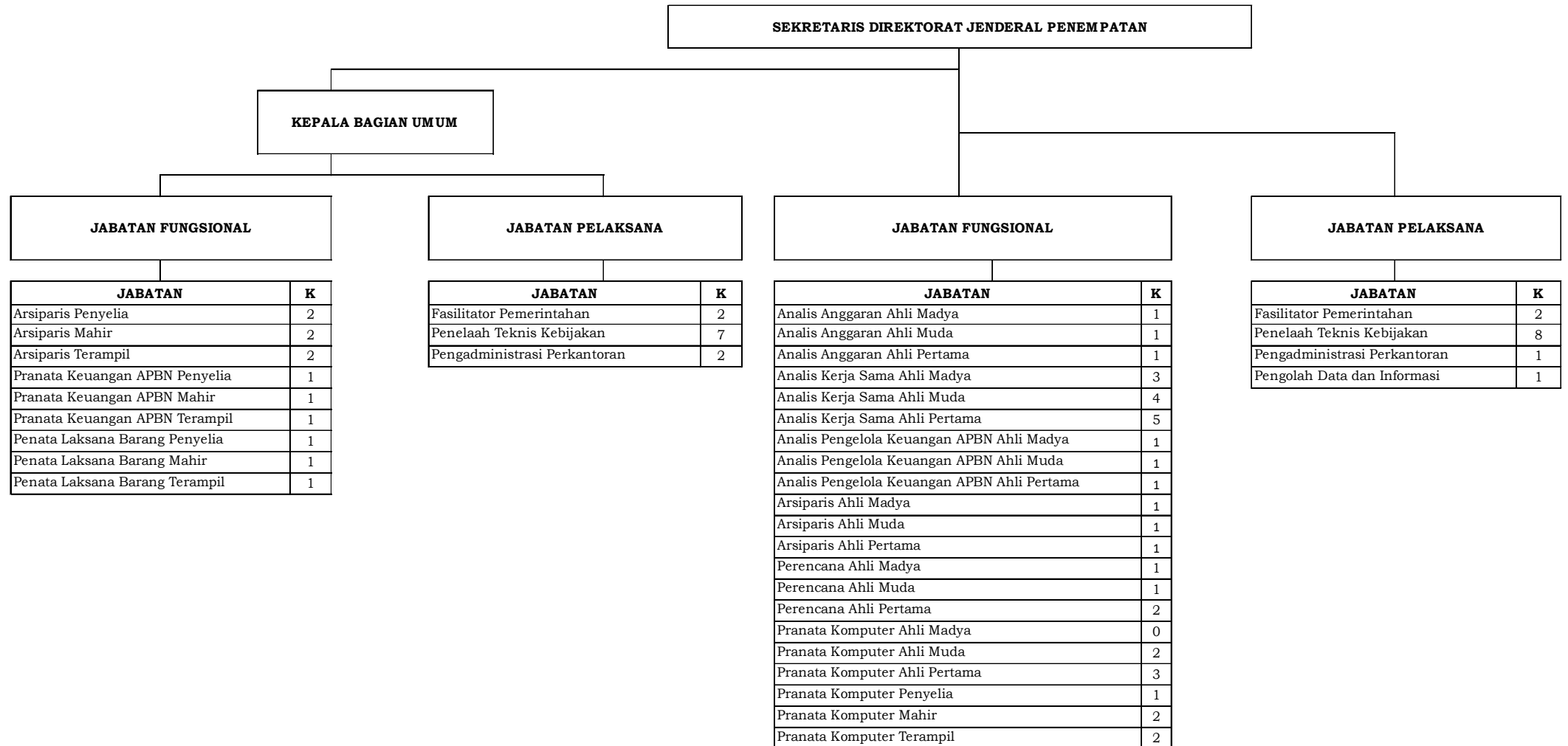
D. DIREKTORAT PEMBINAAN KELEMBAGAAN VOKASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA



E. DIREKTORAT PROMOSI DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI



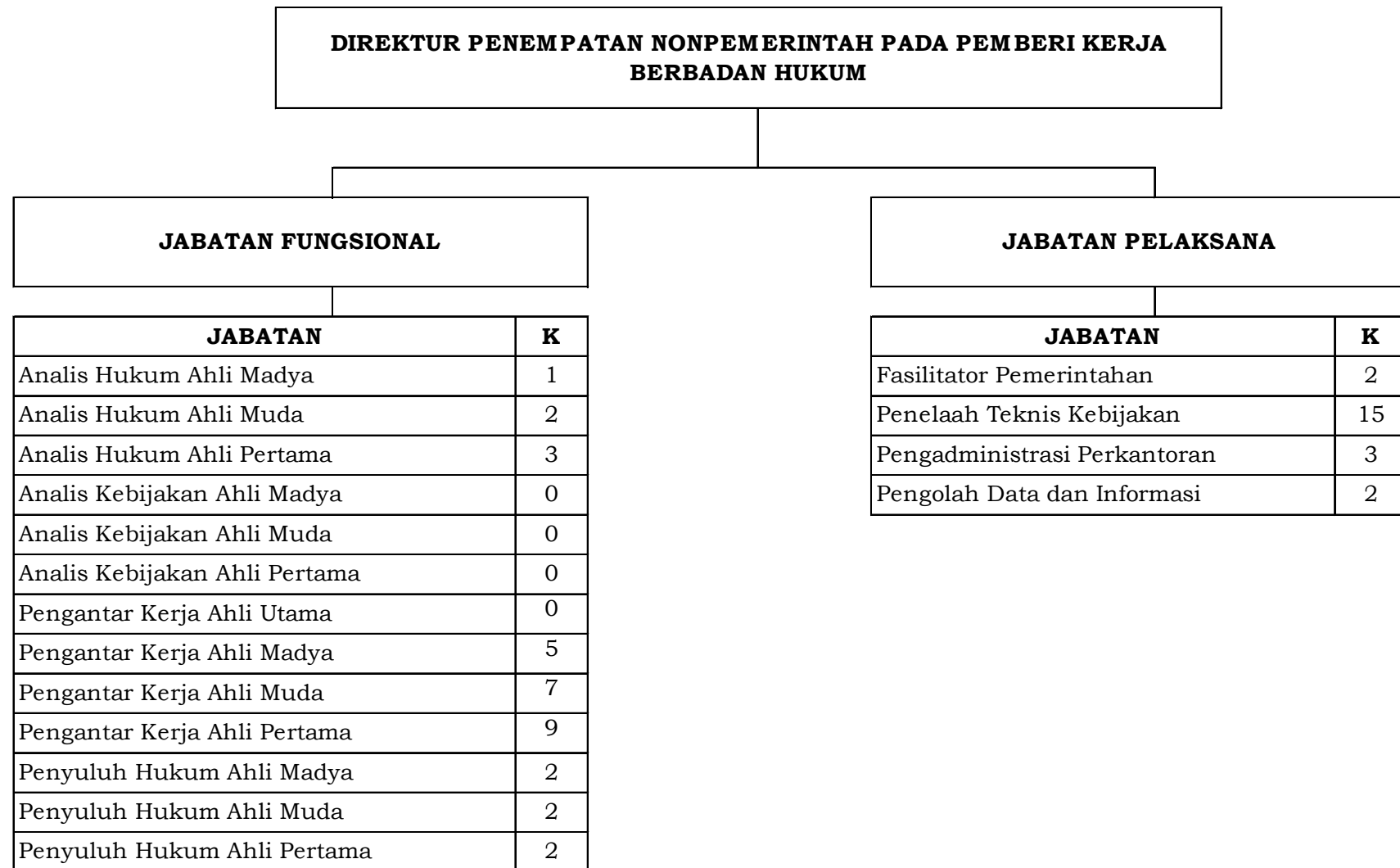
III. PETA JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENEMPATAN
A. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEMPATAN



B. DIREKTORAT PENEMPATAN NONPEMERINTAH PADA PEMBERI KERJA PERSEORANGAN



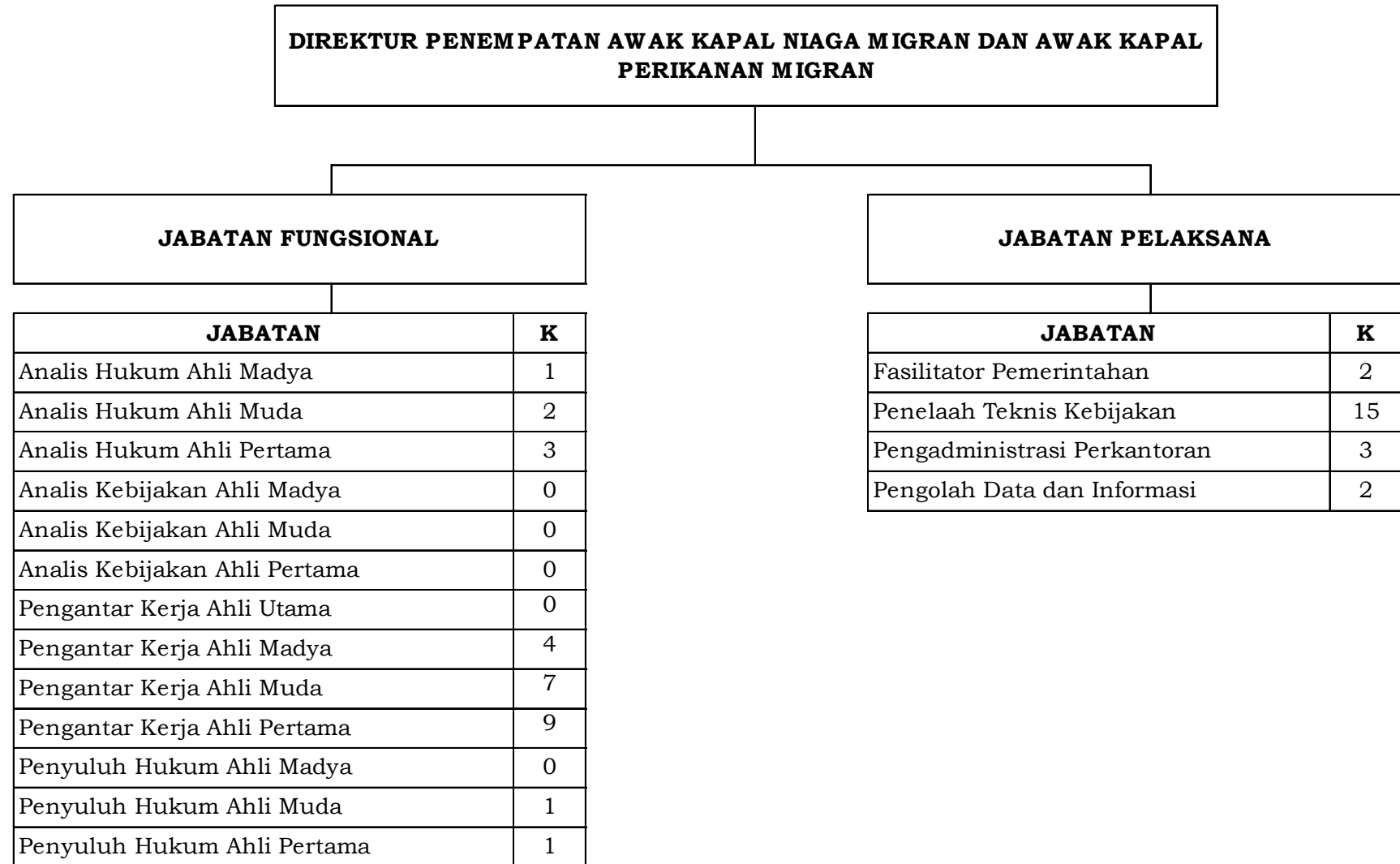
C. DIREKTORAT PENEMPATAN NONPEMERINTAH PADA PEMBERI KERJA BERBADAN HUKUM



D. DIREKTORAT PENEMPATAN PEMERINTAH



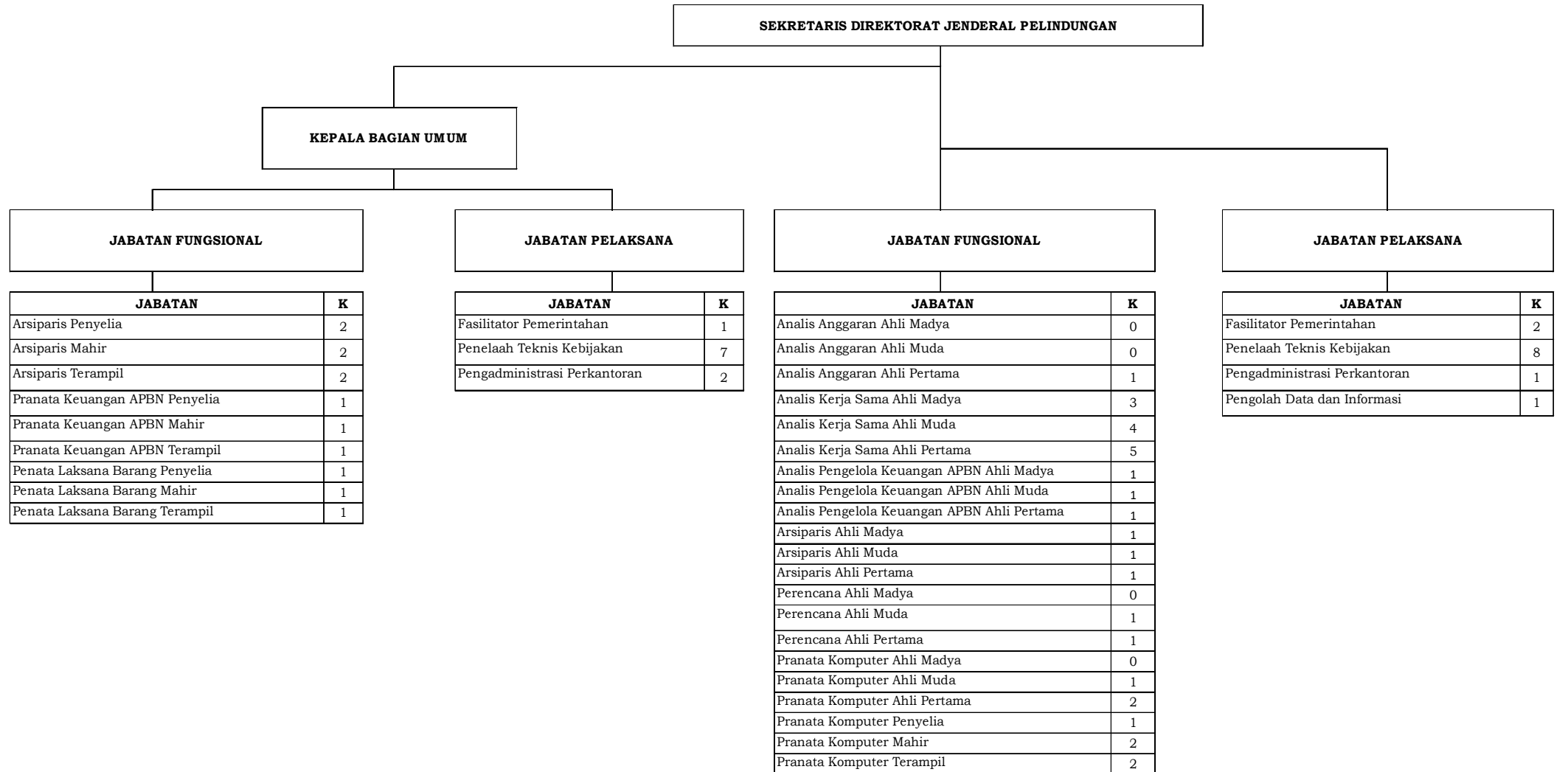
E. DIREKTORAT PENEMPATAN AWAK KAPAL NIAGA MIGRAN DAN AWAK KAPAL PERIKANAN MIGRAN



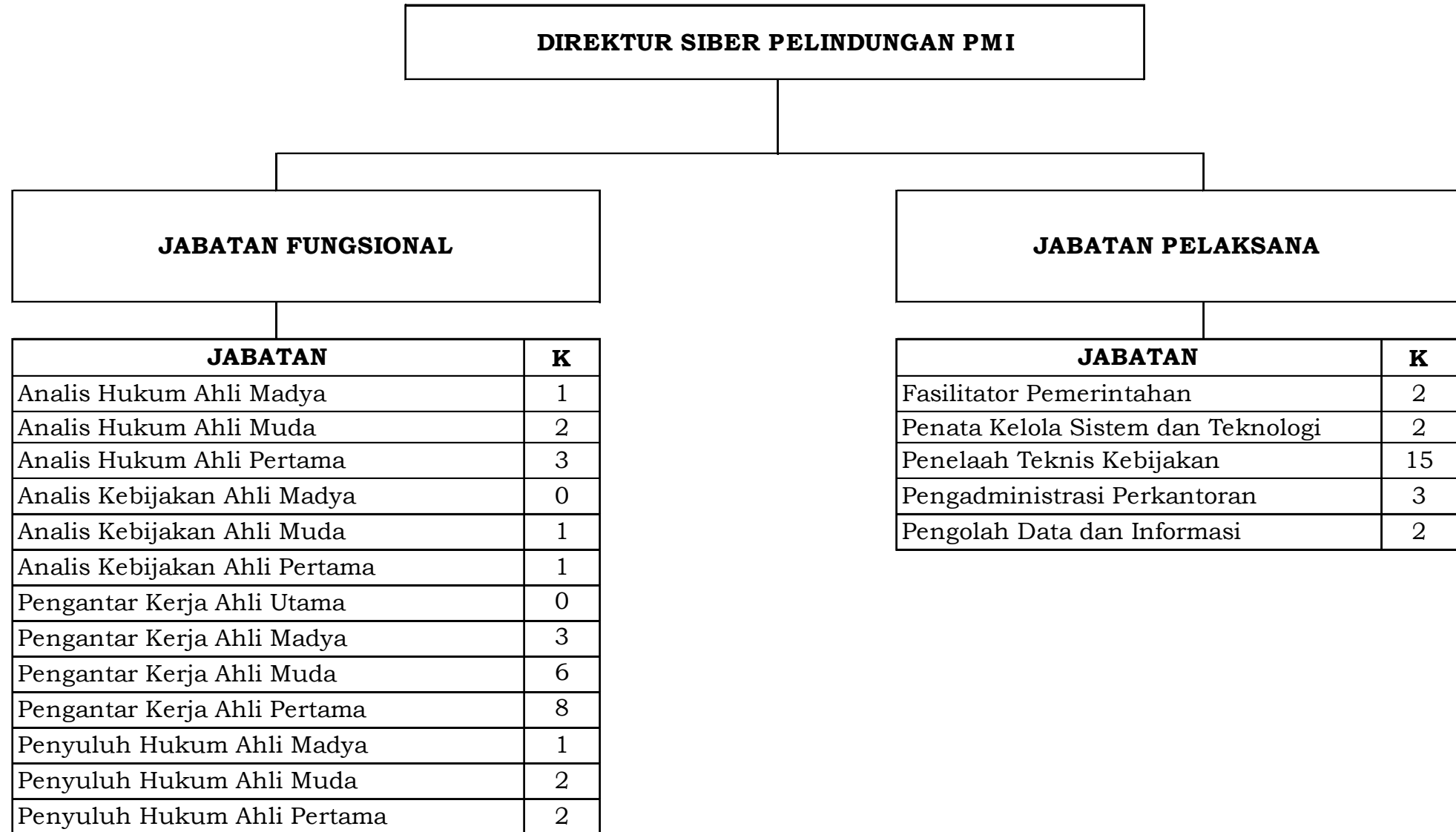
F. DIREKTORAT KELEMBAGAAN PENEMPATAN



IV. PETA JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN
A. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN



B. DIREKTORAT SIBER PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA



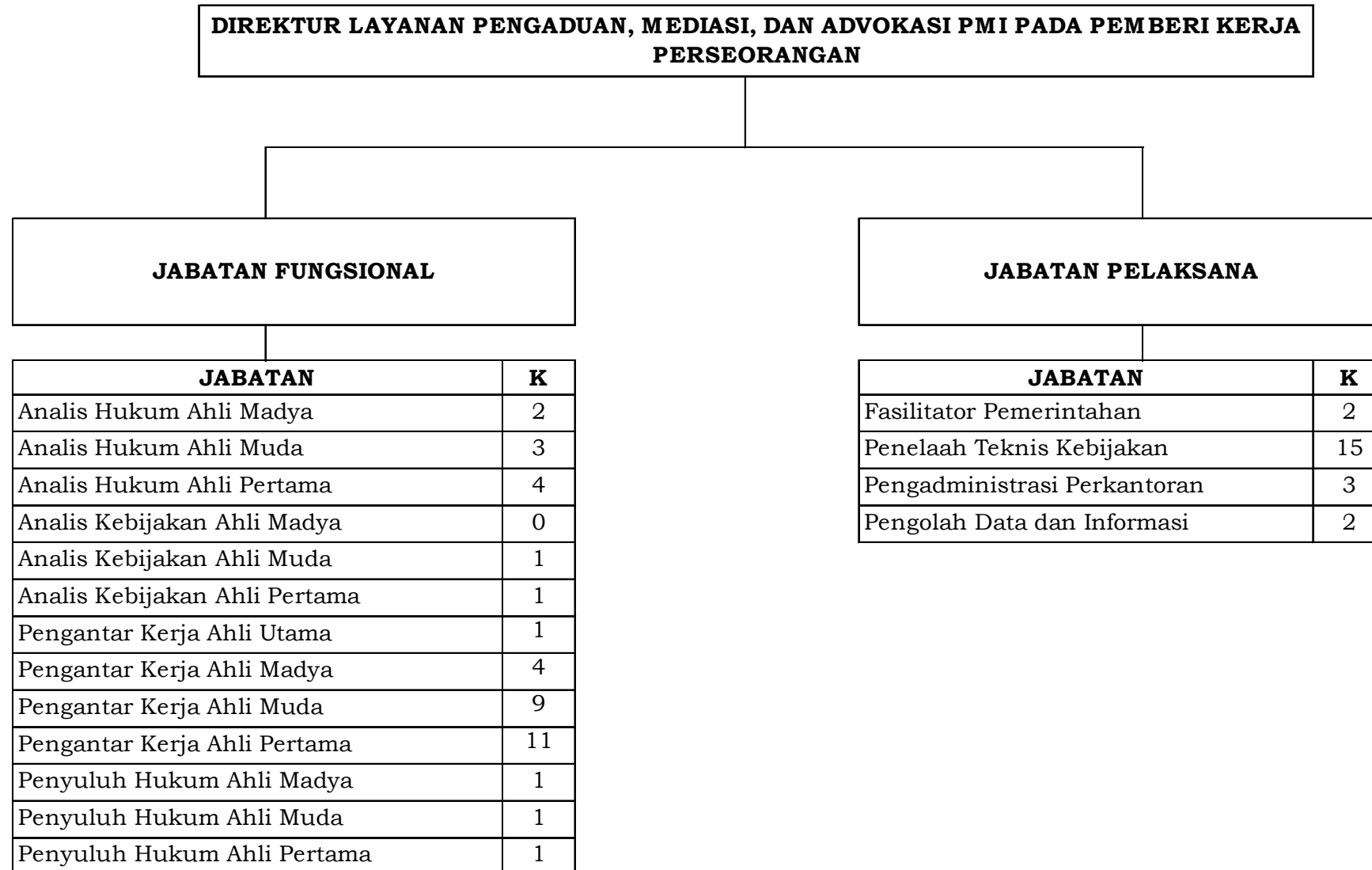
C. DIREKTORAT BINA KEMITRAAN PELINDUNGAN



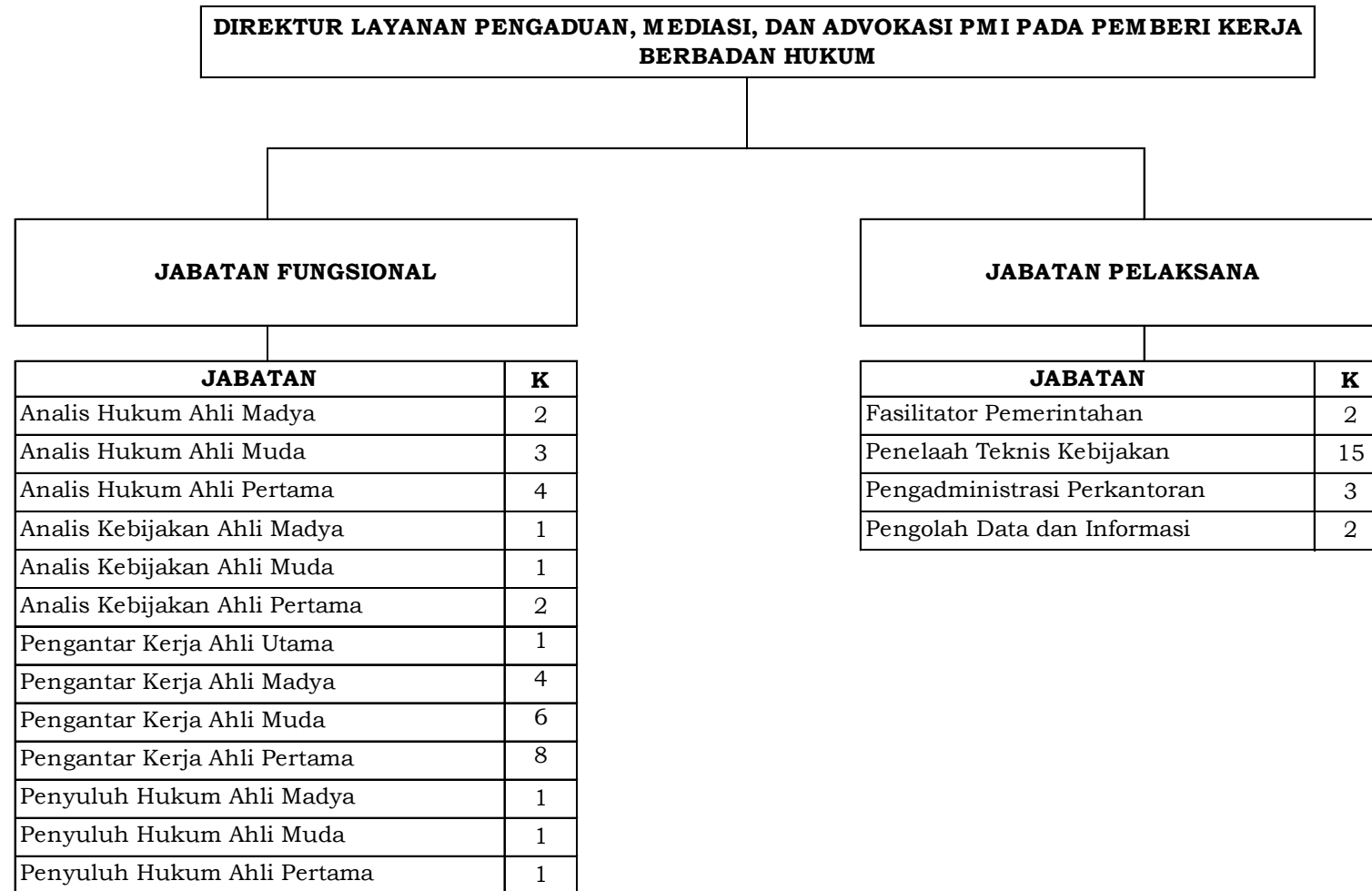
D. DIREKTORAT PENGAWASAN, PENCEGAHAN, DAN PENINDAKAN



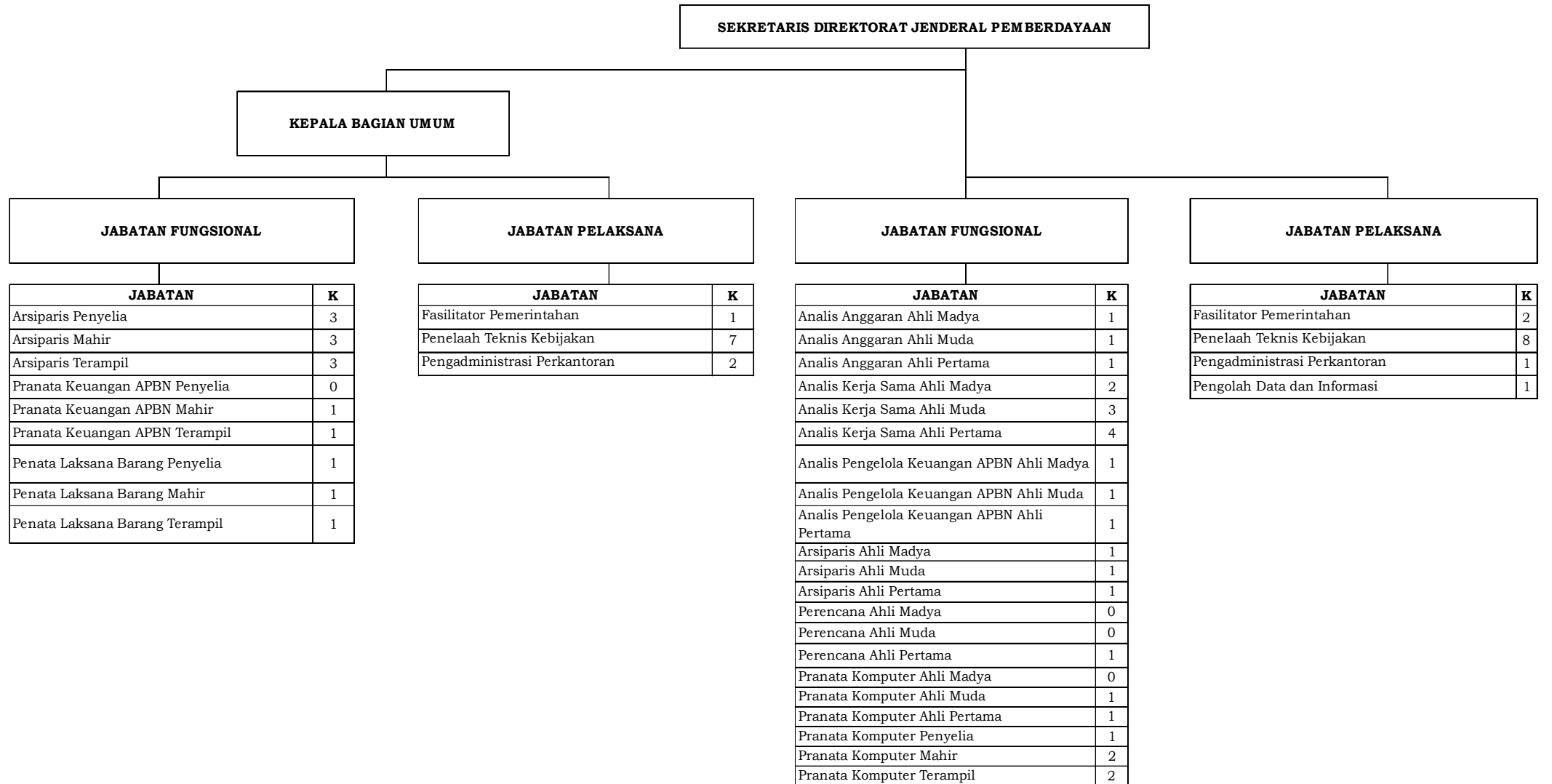
E. DIREKTORAT LAYANAN PENGADUAN, MEDIASI, DAN ADVOKASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA PEMBERI KERJA PERSEORANGAN



F. DIREKTORAT LAYANAN PENGADUAN, MEDIASI, DAN ADVOKASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA PEMBERI KERJA BERBADAN HUKUM



V. PETA JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN
A. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN



B. DIREKTORAT LITERASI KEUANGAN DAN PEMANFAATAN REMITANSI



C. DIREKTORAT KEPULANGAN DAN REHABILITASI



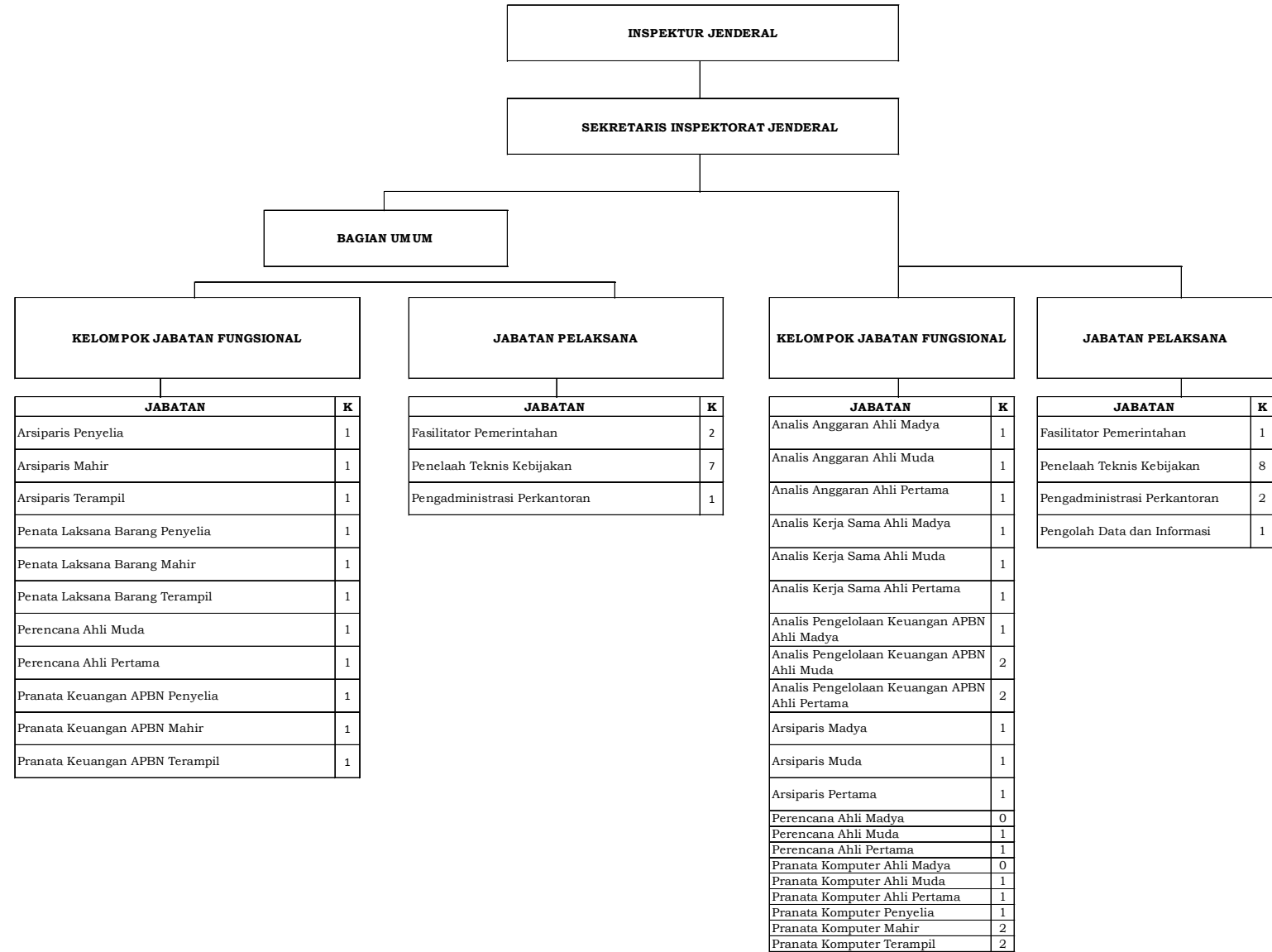
D. DIREKTORAT REINTEGRASI DAN PENGUATAN KELUARGA



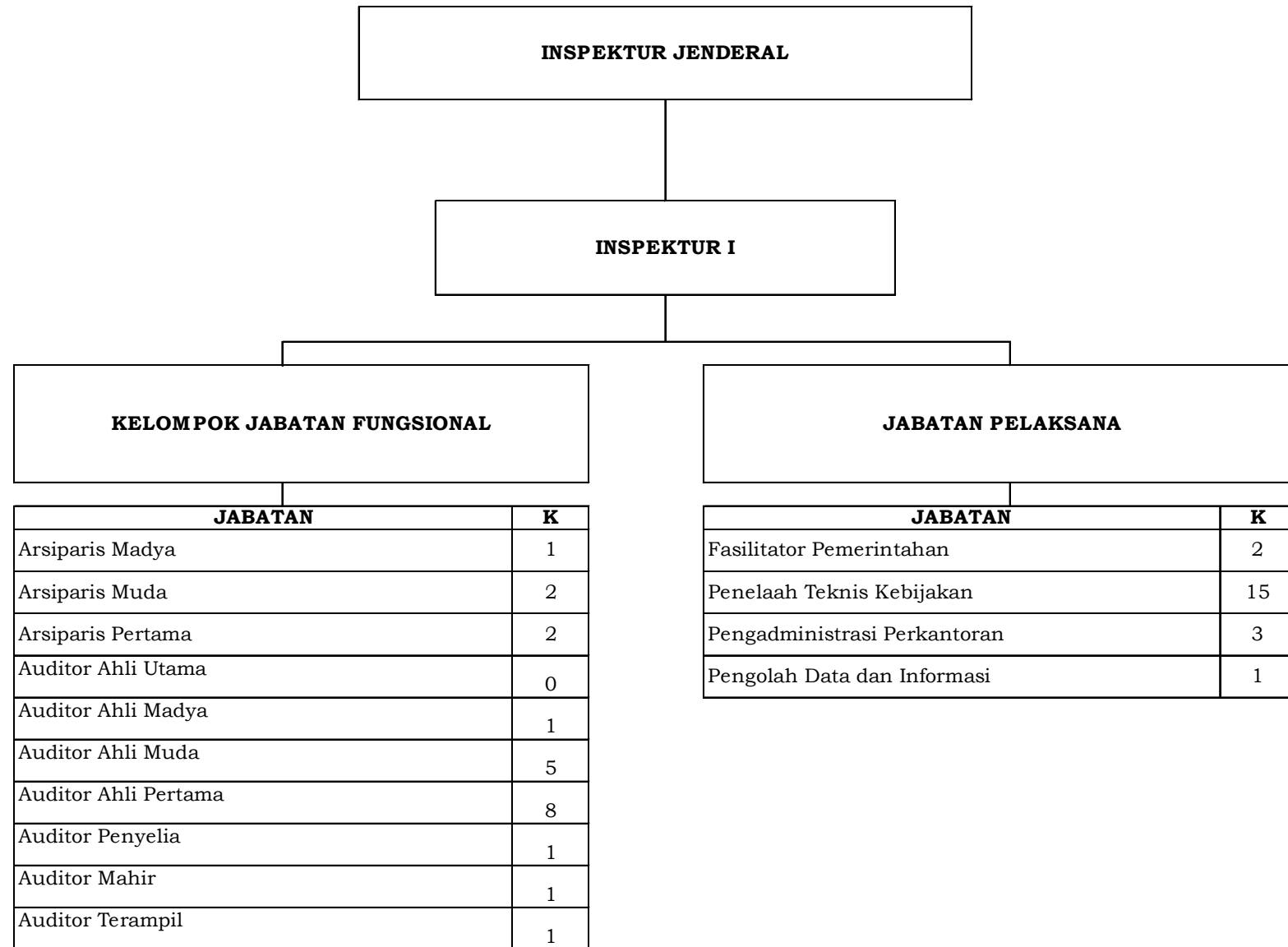
E. DIREKTORAT KEWIRAUSAHAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PRODUKTIF



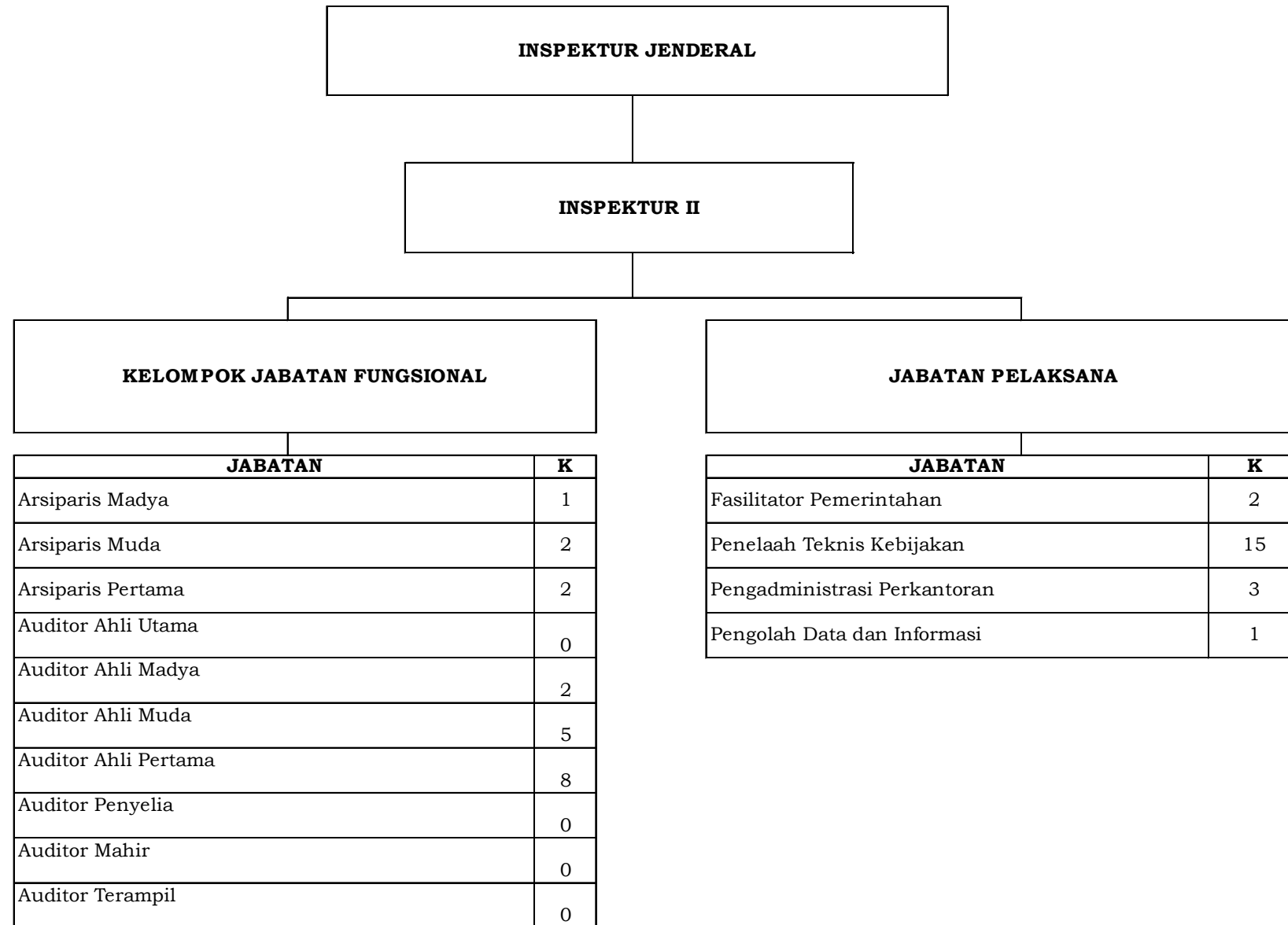
VI. PETA JABATAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
A. SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL



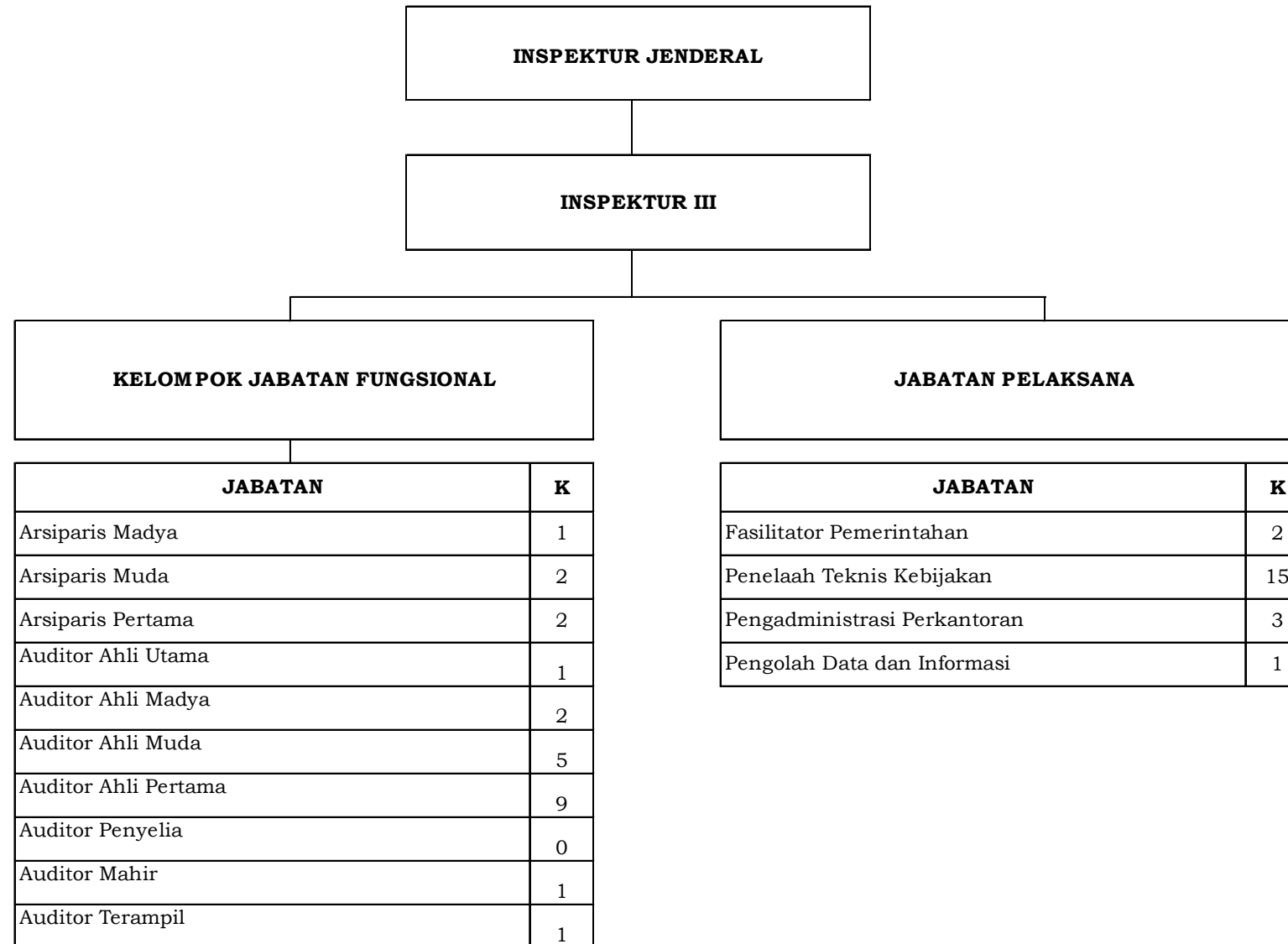
B. INSPEKTORAT I



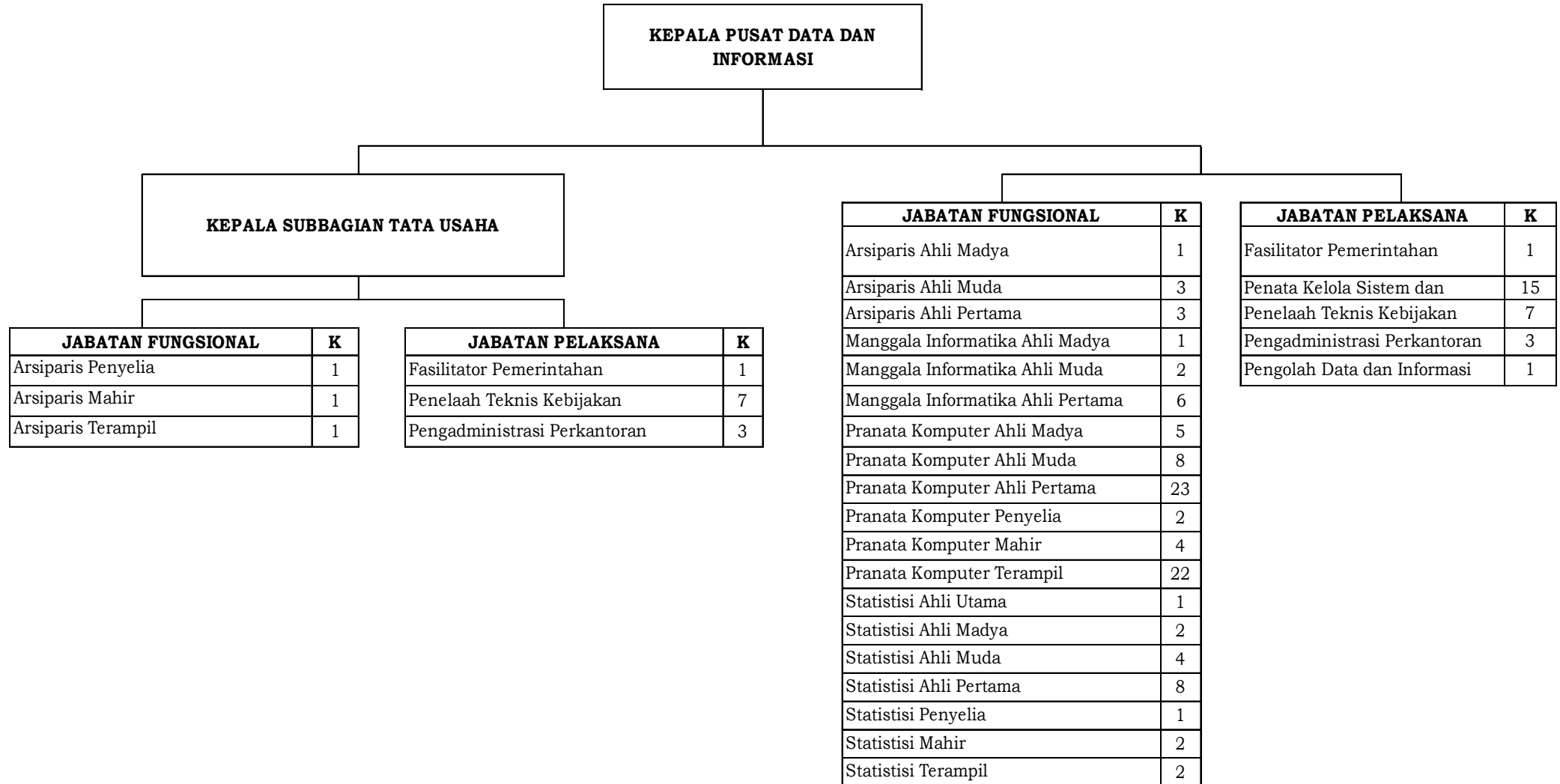
C. INSPEKTORAT II



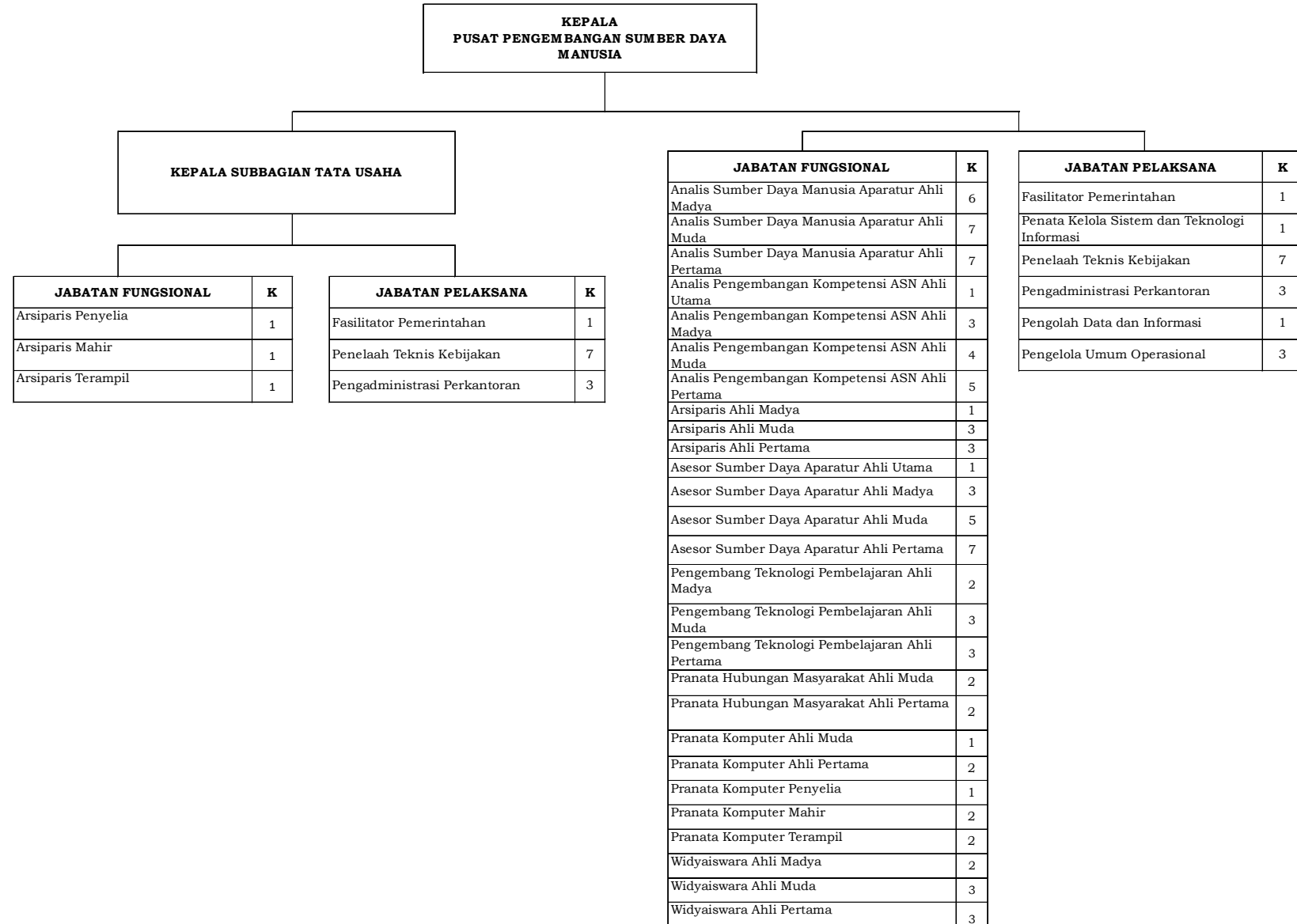
D. INSPEKTORAT III



VII. PETA JABATAN DI LINGKUNGAN PUSAT DATA DAN INFORMASI

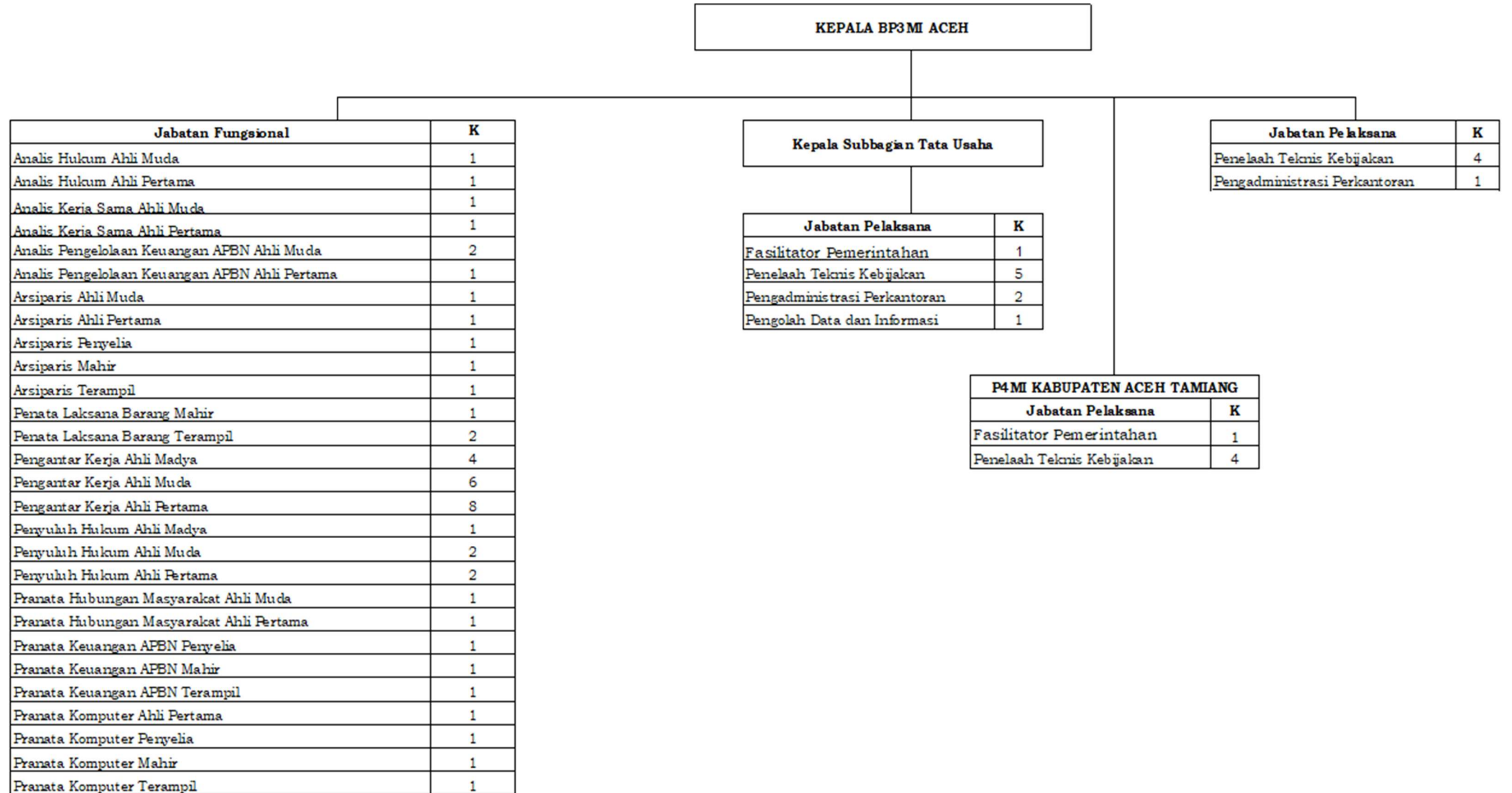


VIII. PETA JABATAN DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

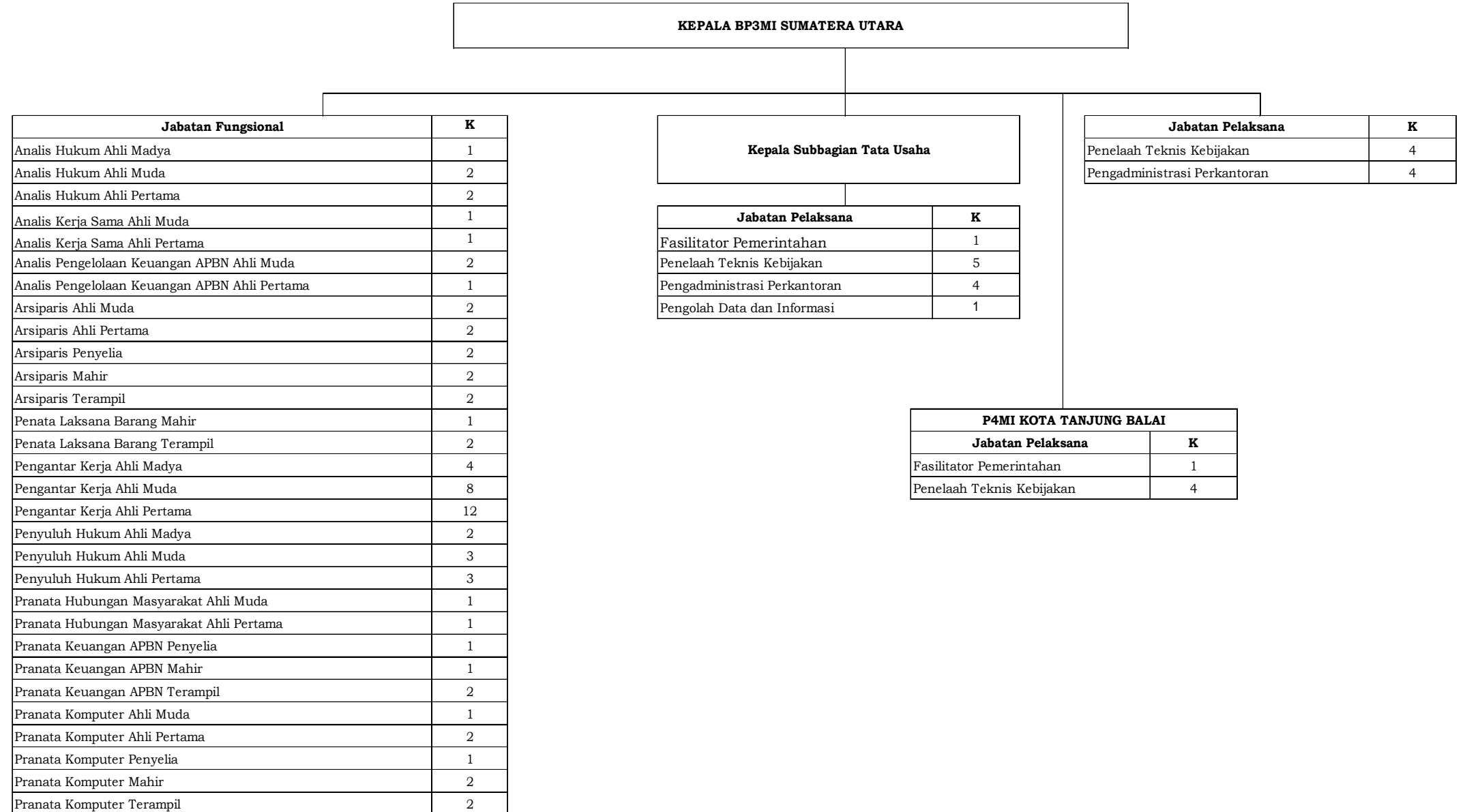


IX. PETA JABATAN DI LINGKUNGAN BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

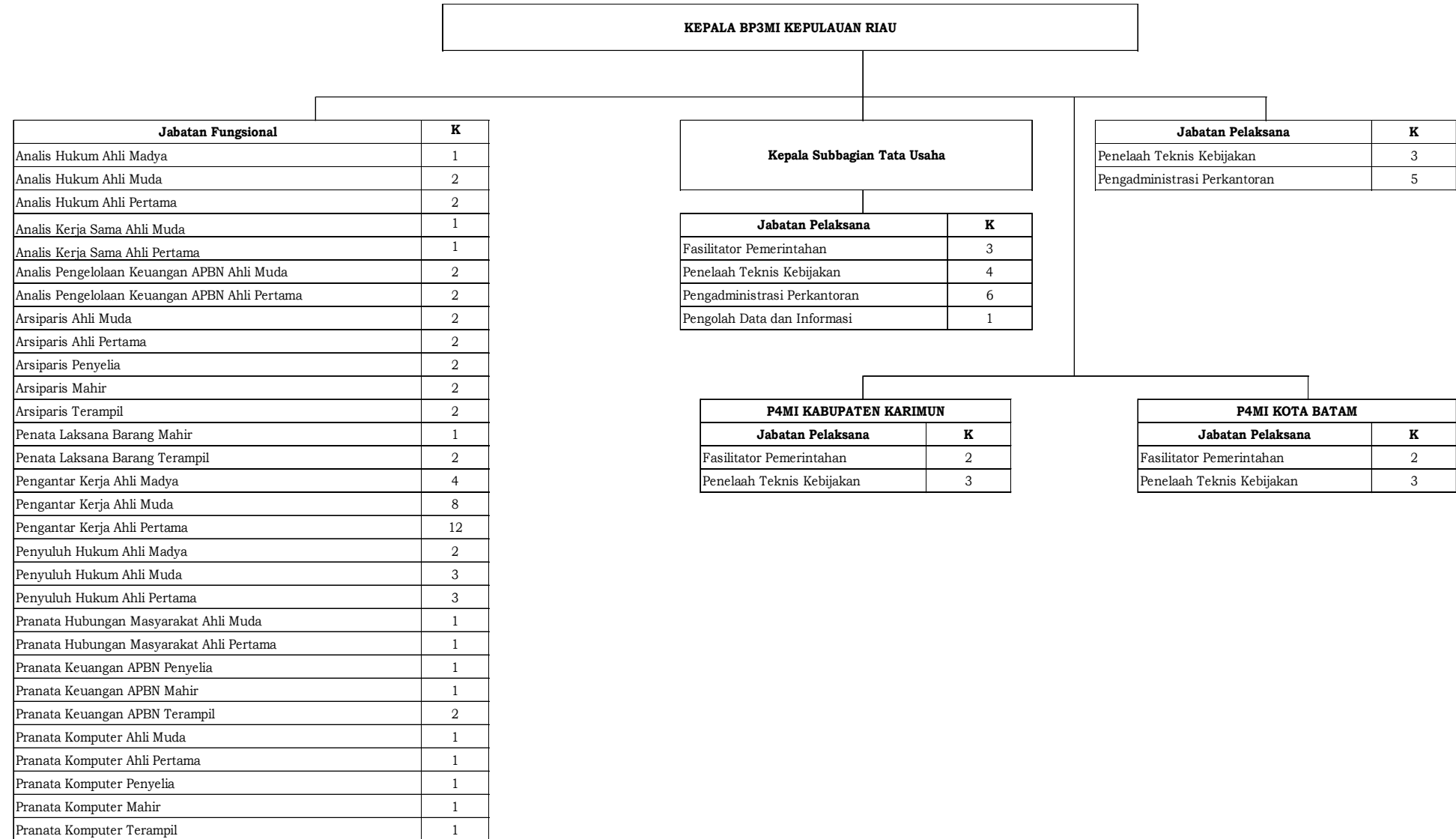
A. BP3MI ACEH



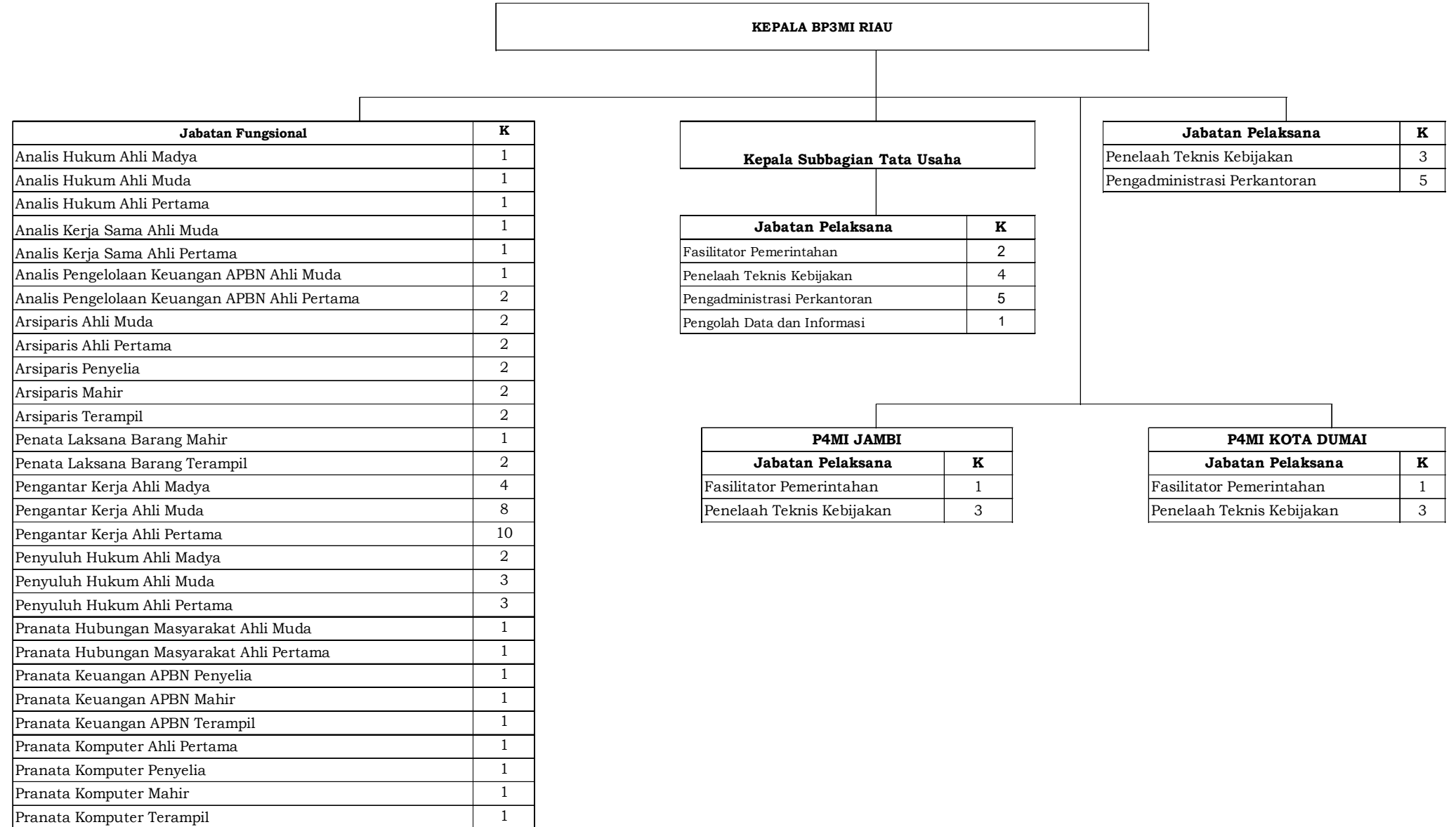
B. BP3MI SUMATERA UTARA



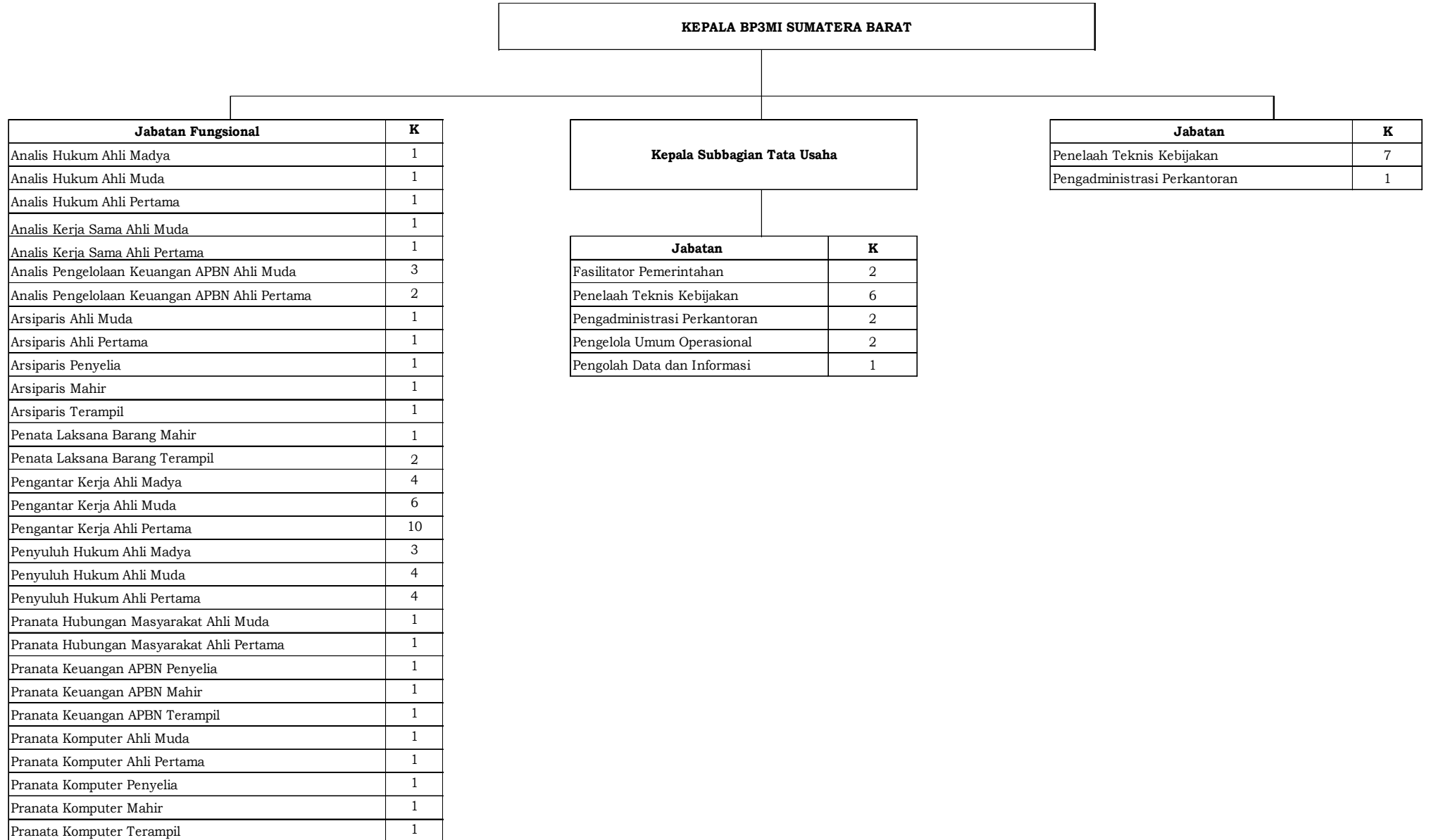
C. BP3MI KEPULAUAN RIAU



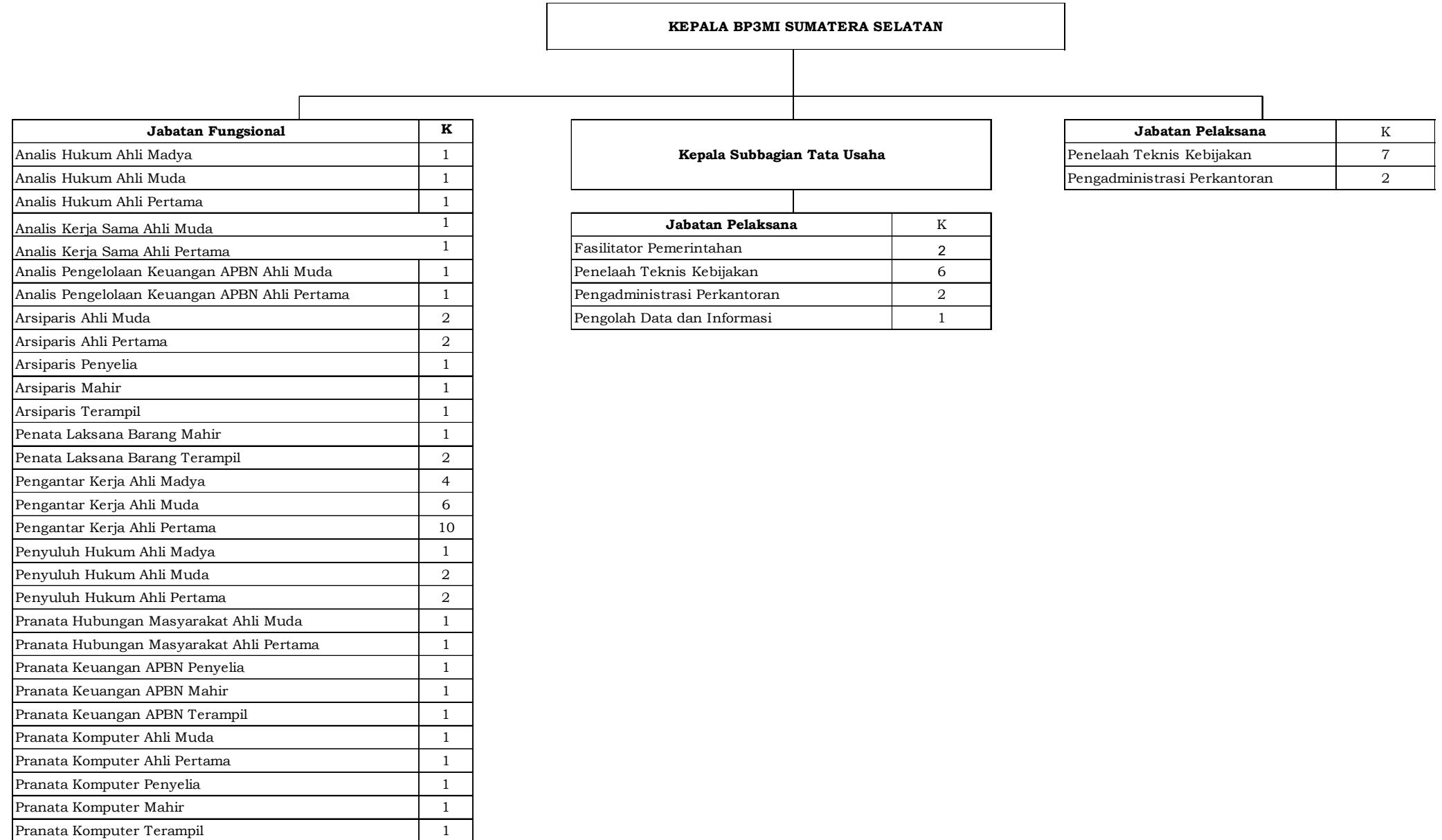
D. BP3MI RIAU



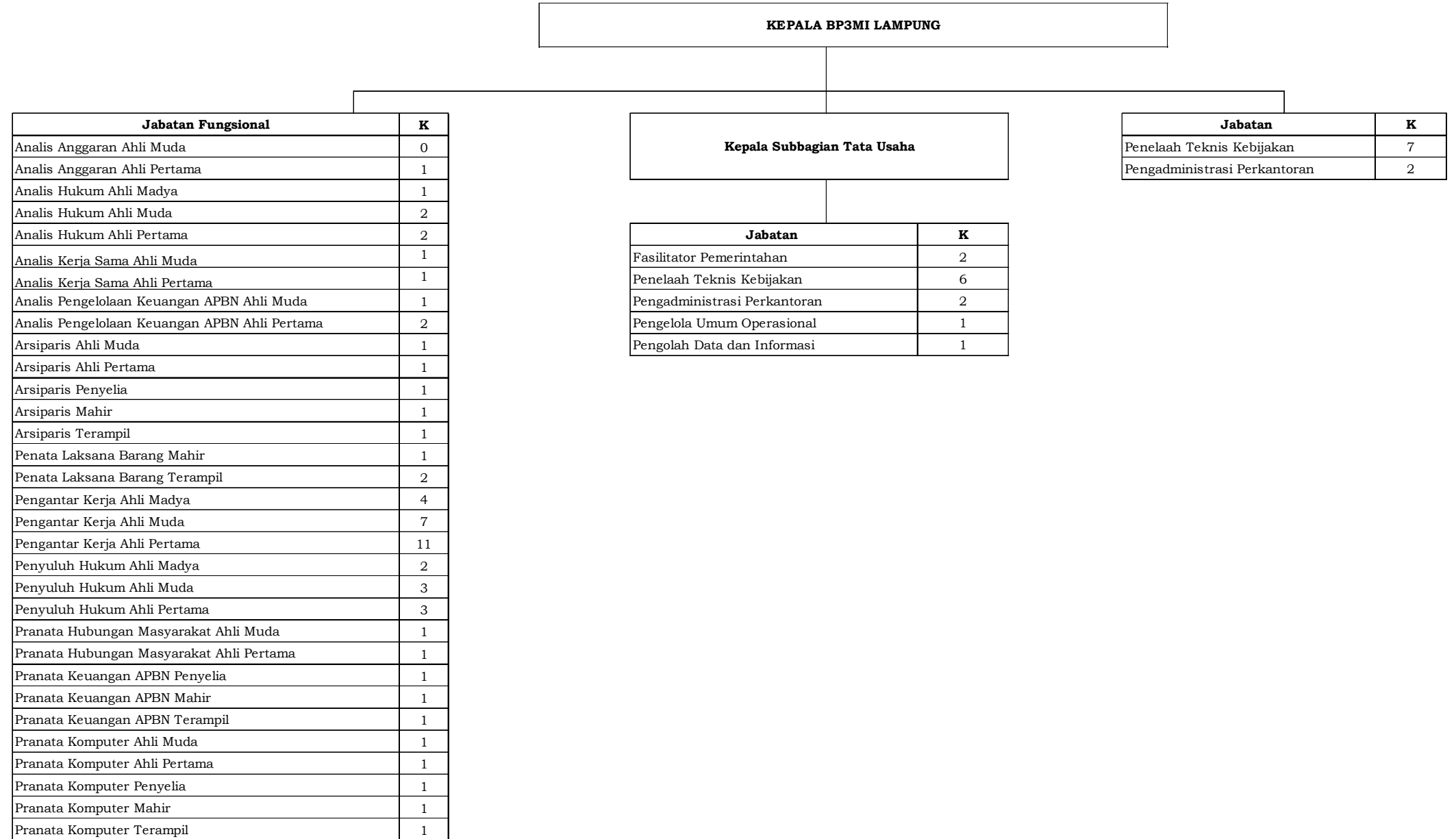
E. BP3MI SUMATERA BARAT



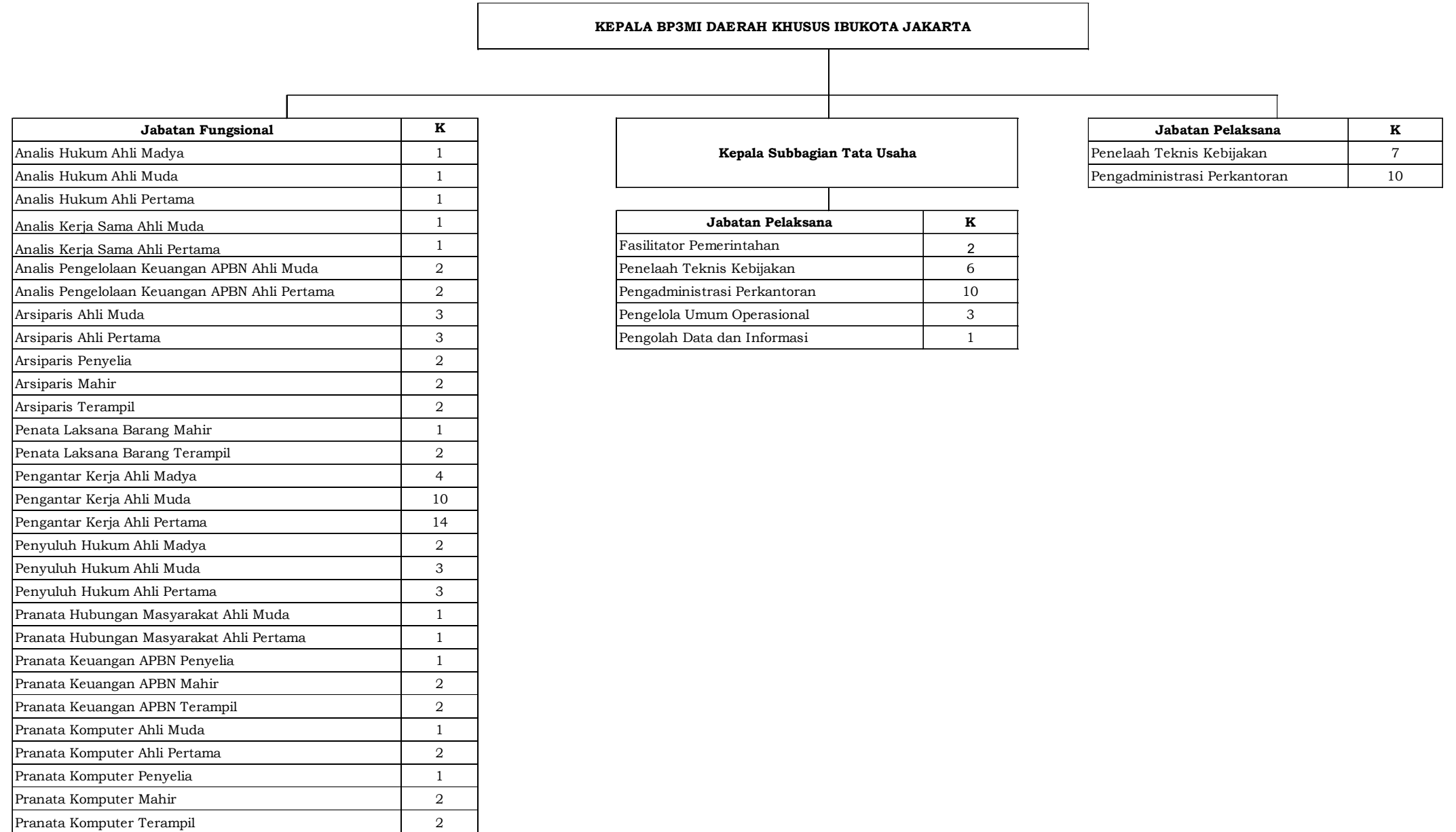
F. BP3MI SUMATERA SELATAN



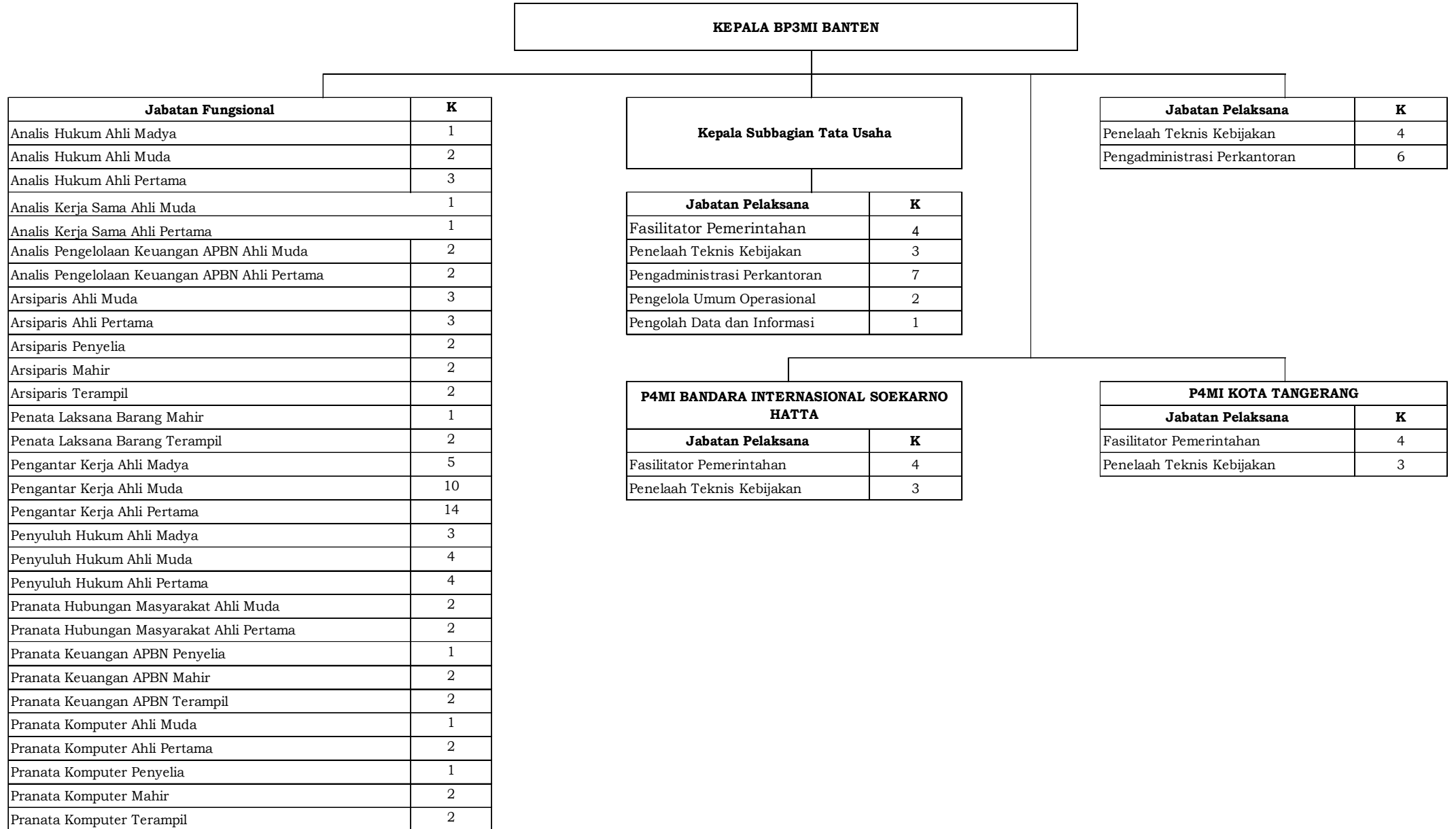
G. BP3MI LAMPUNG



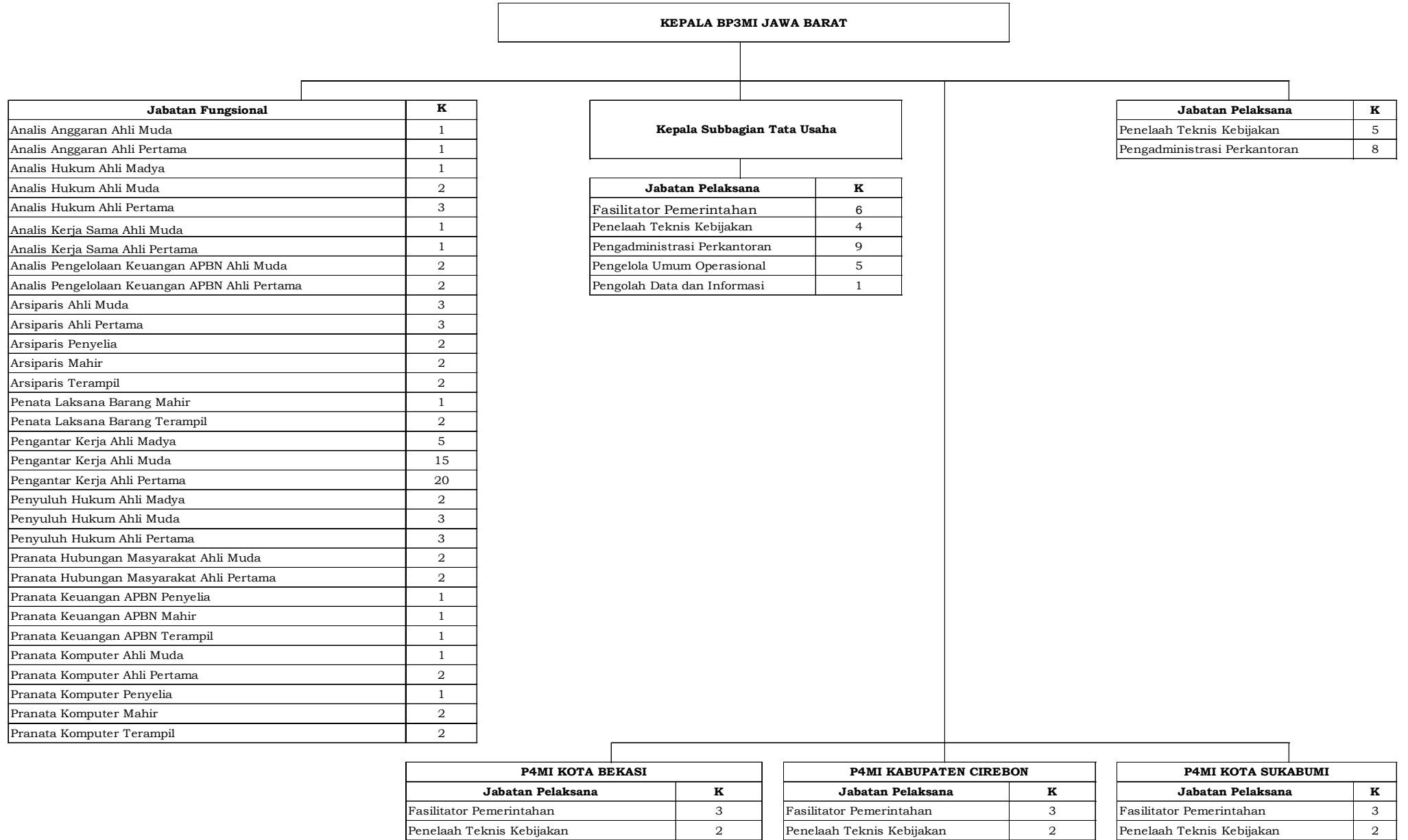
H. BP3MI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



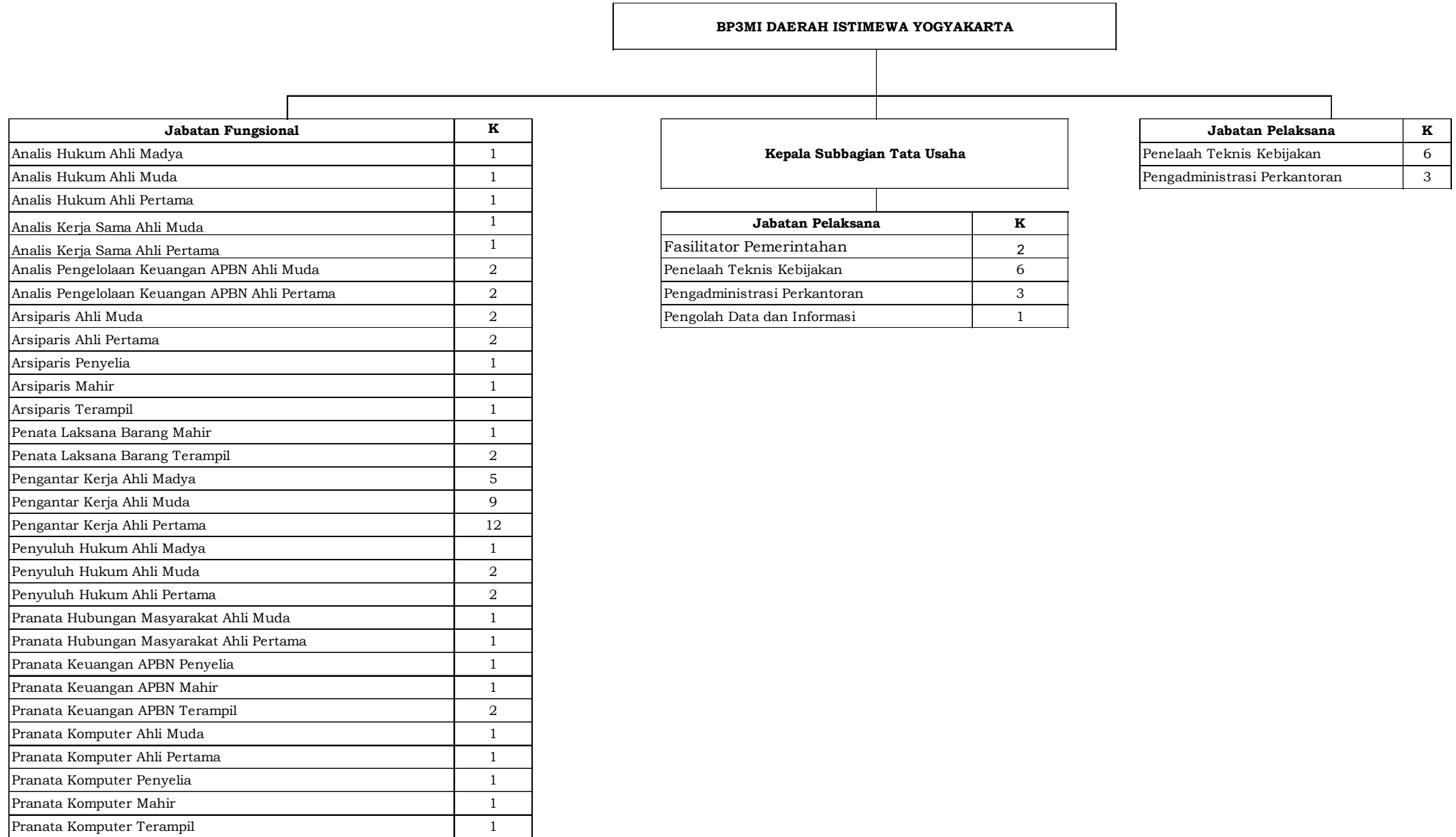
I. BP3MI BANTEN



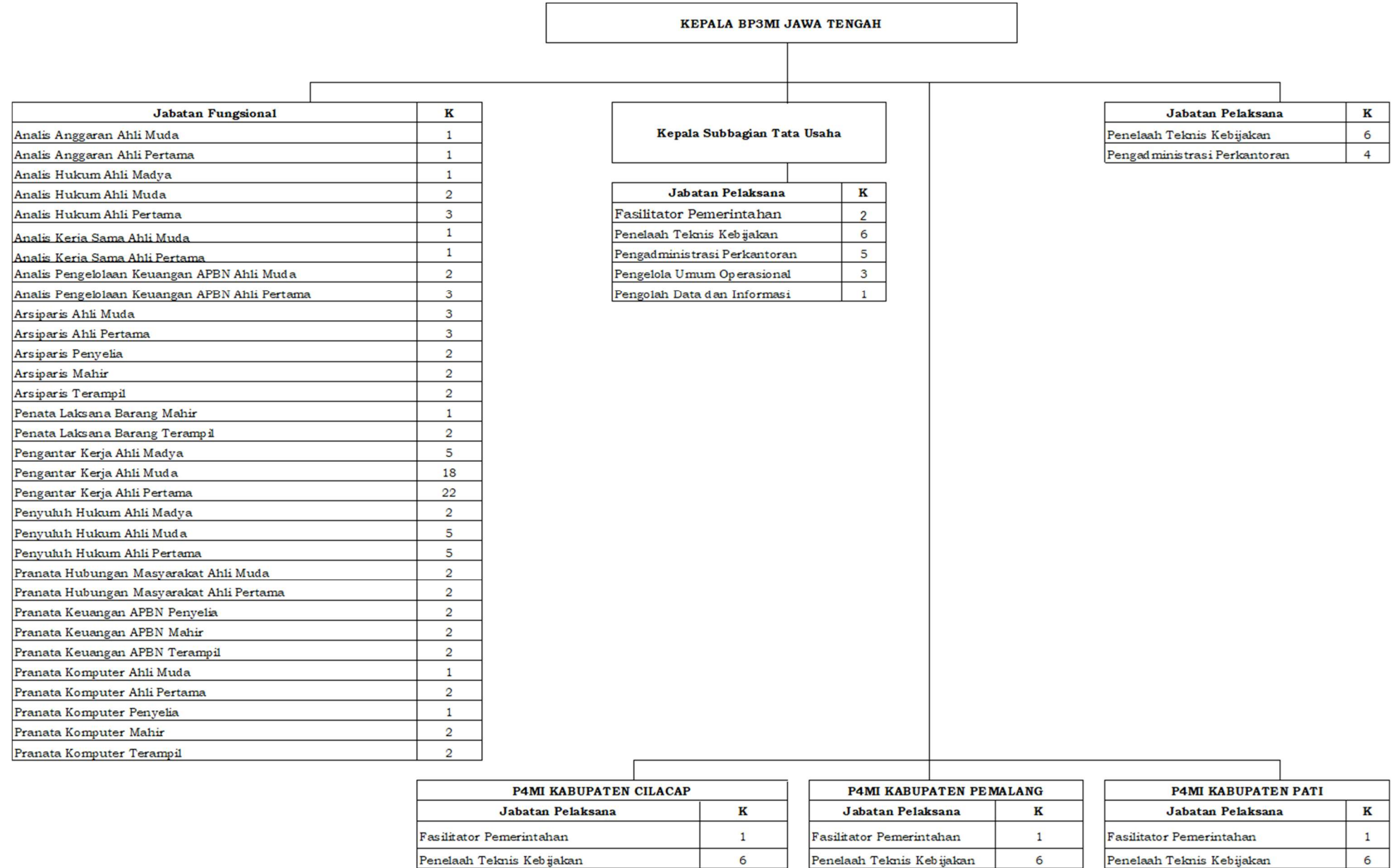
J. BP3MI JAWA BARAT



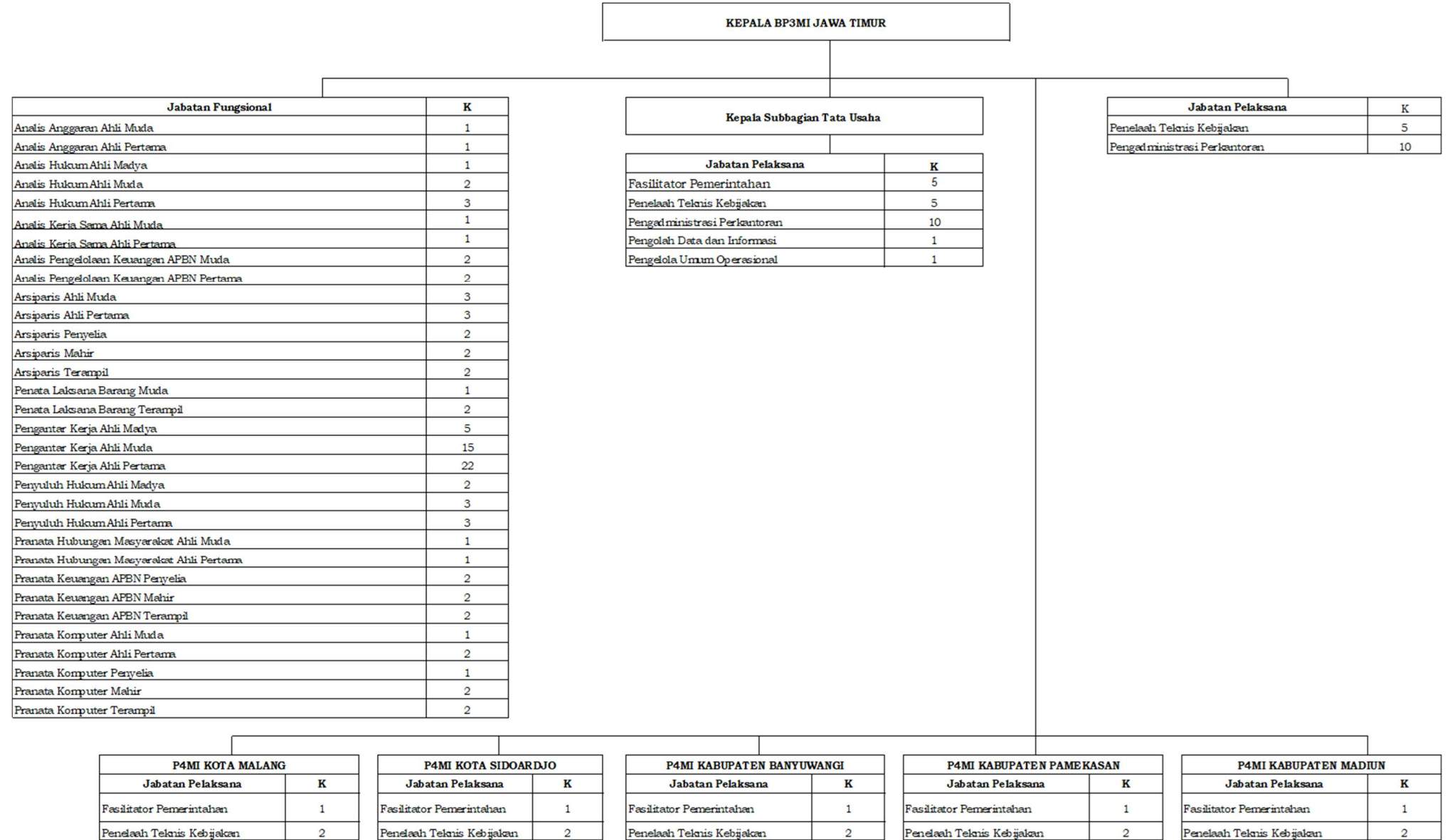
K. BP3MI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



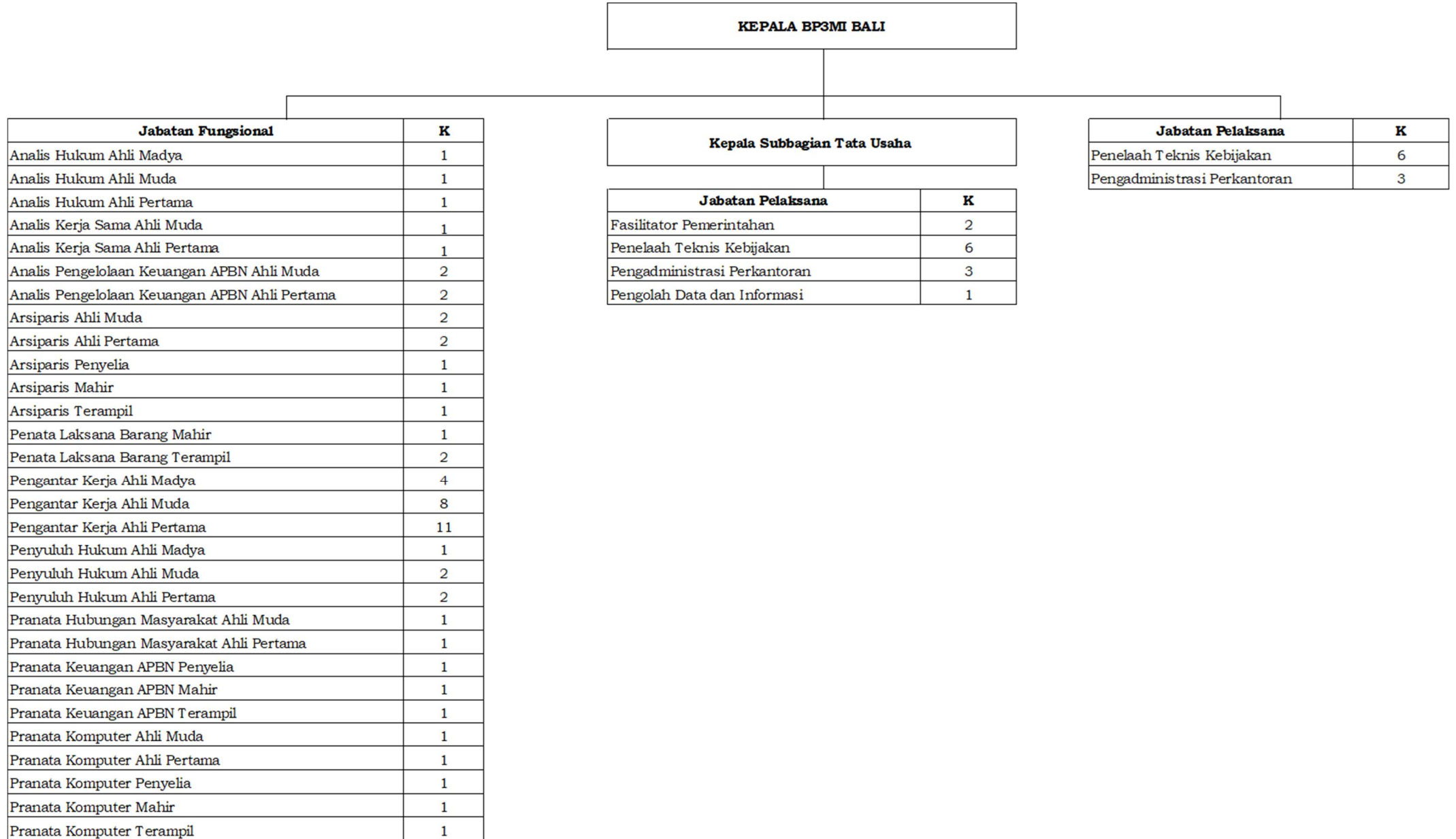
L. BP3MI JAWA TENGAH



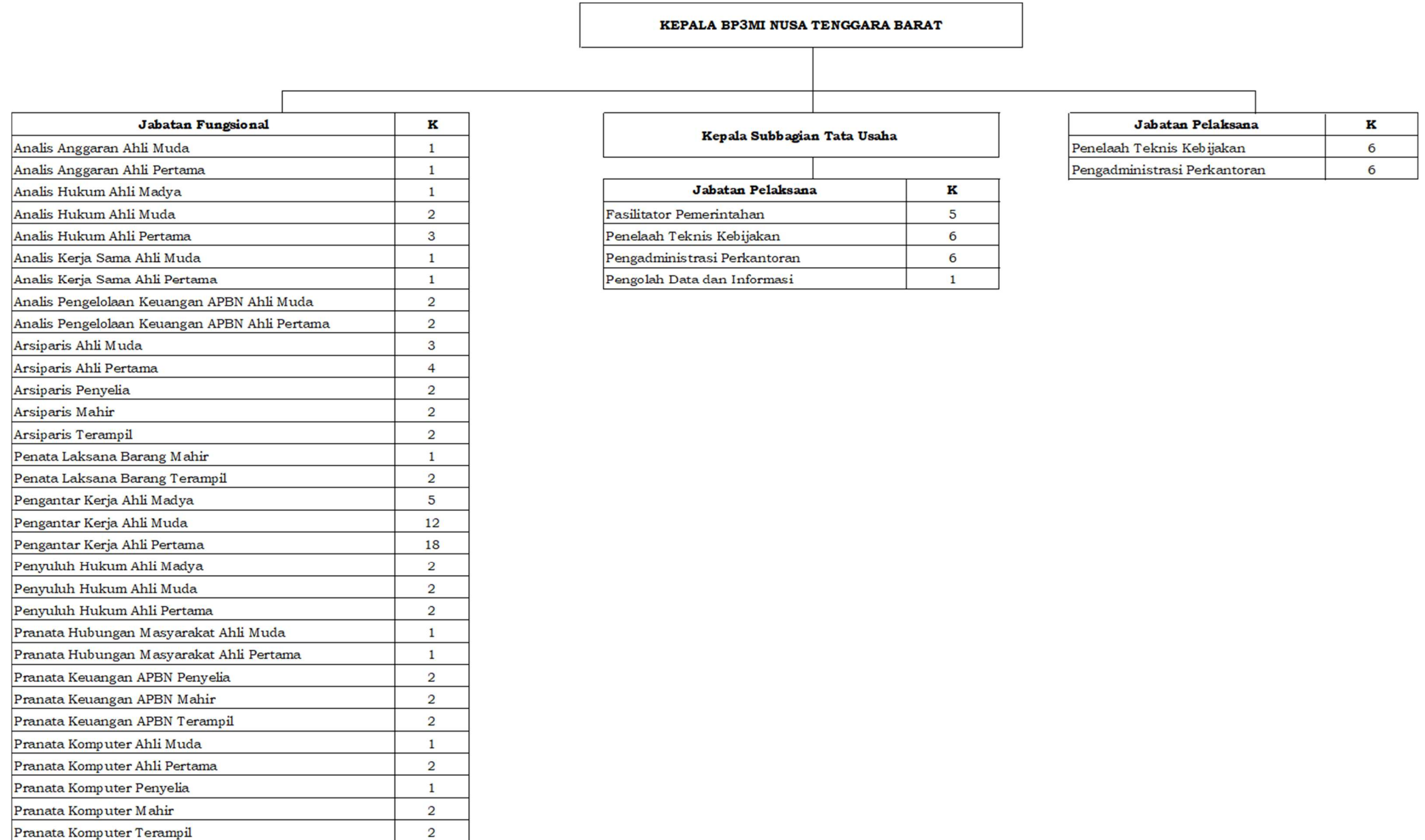
M. BP3MI JAWA TIMUR



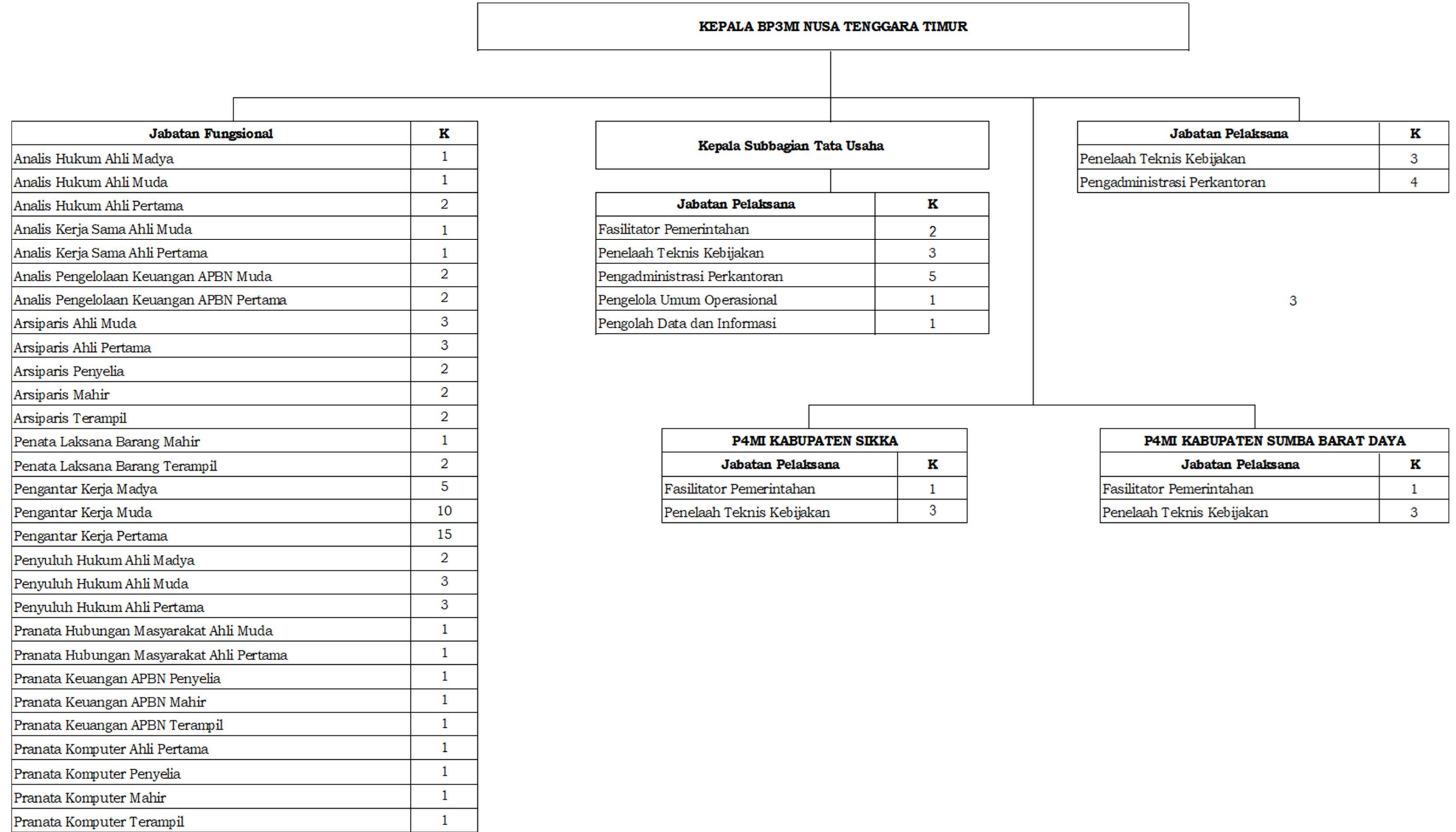
N. BP3MI BALI



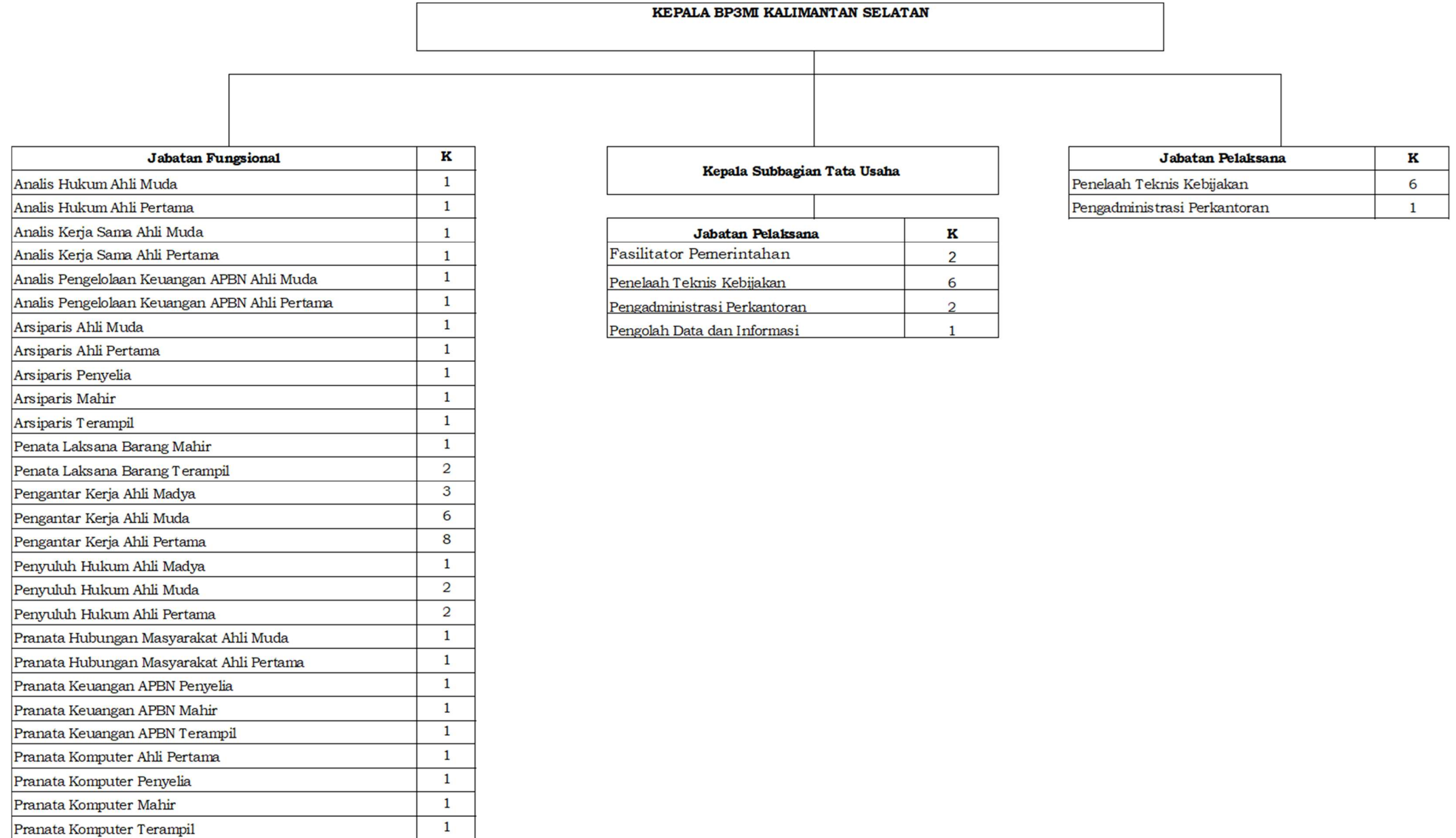
O. BP3MI NUSA TENGGARA BARAT



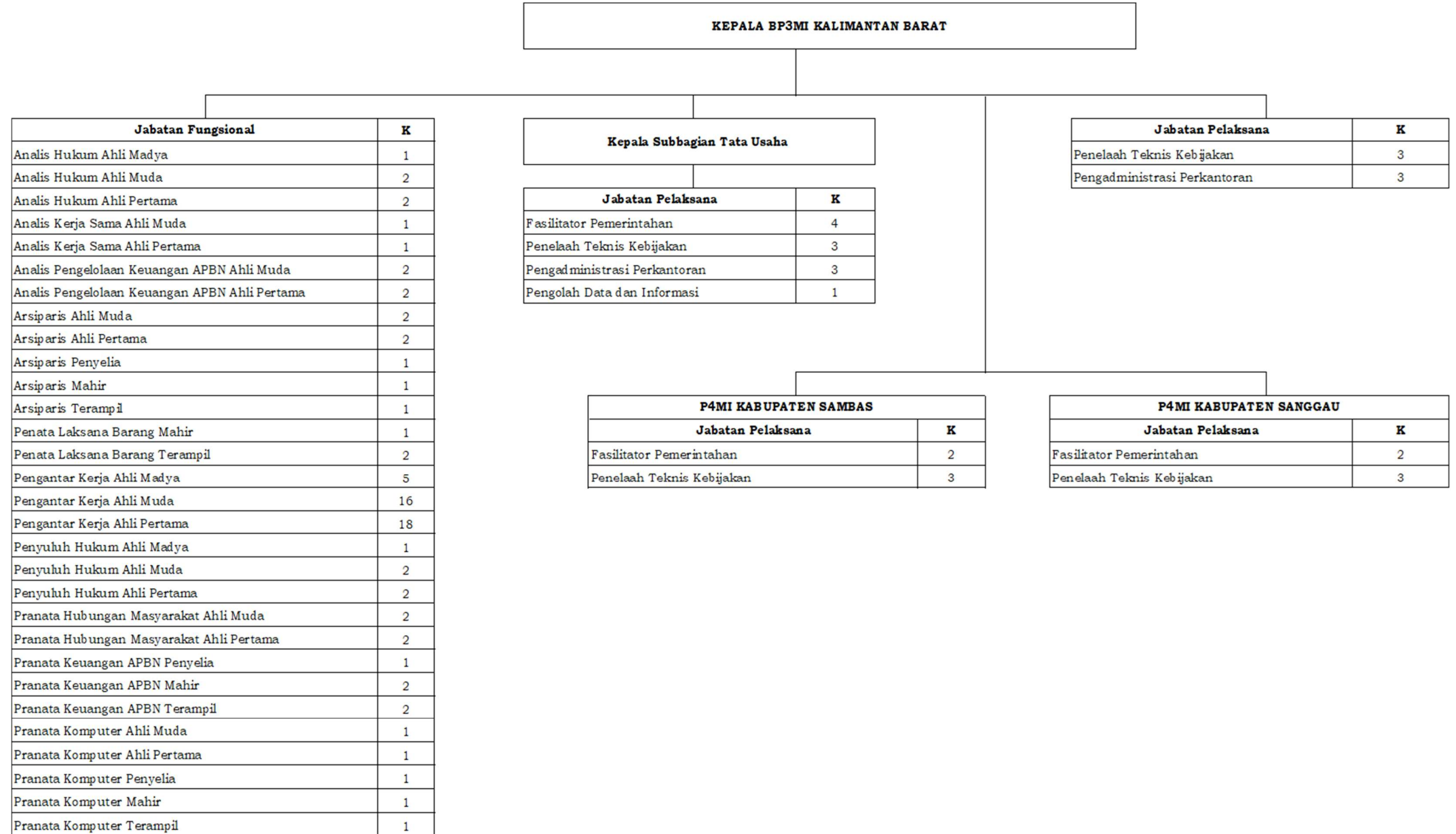
P. BP3MI NUSA TENGGARA TIMUR



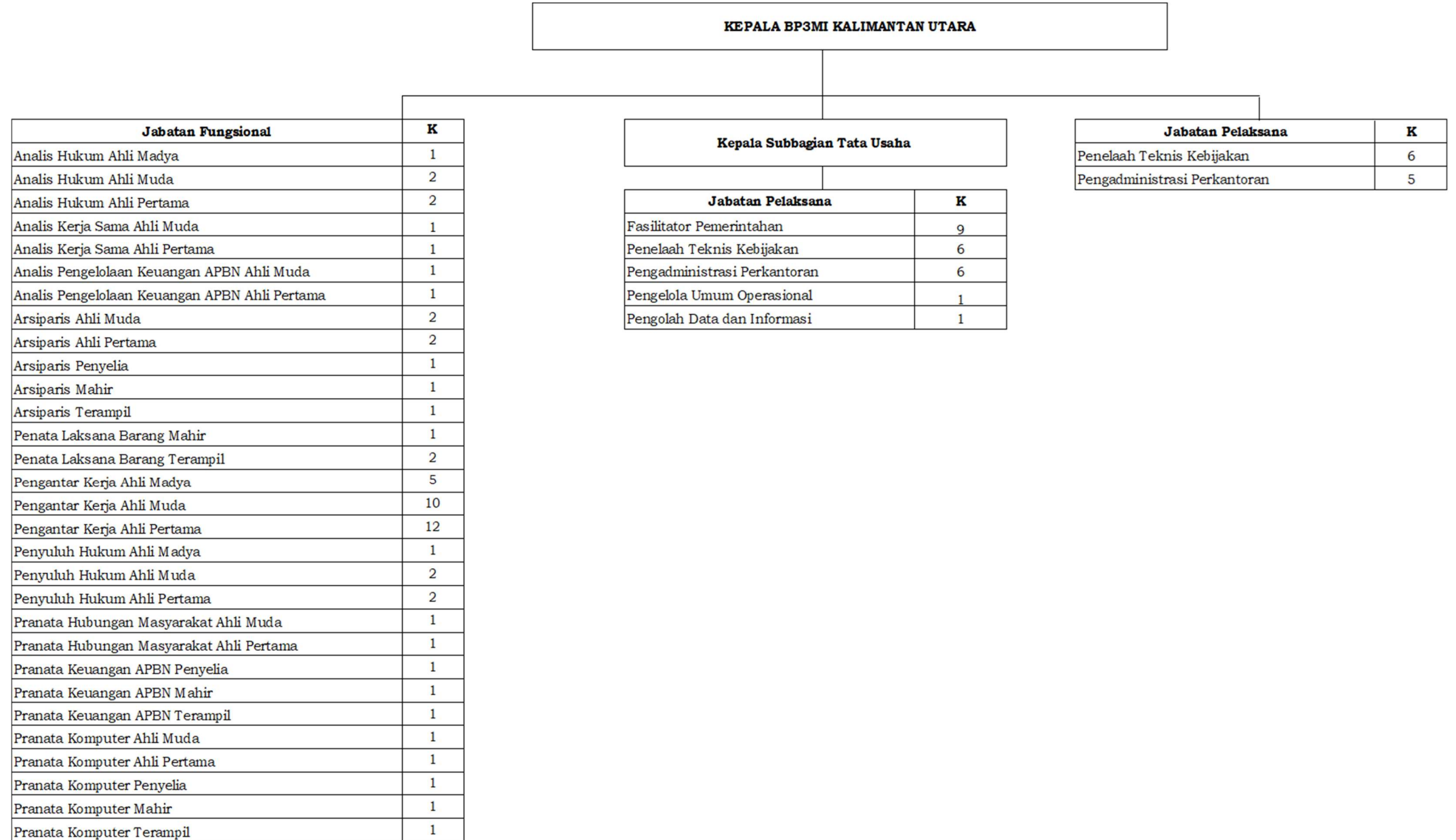
Q. BP3MI KALIMANTAN SELATAN



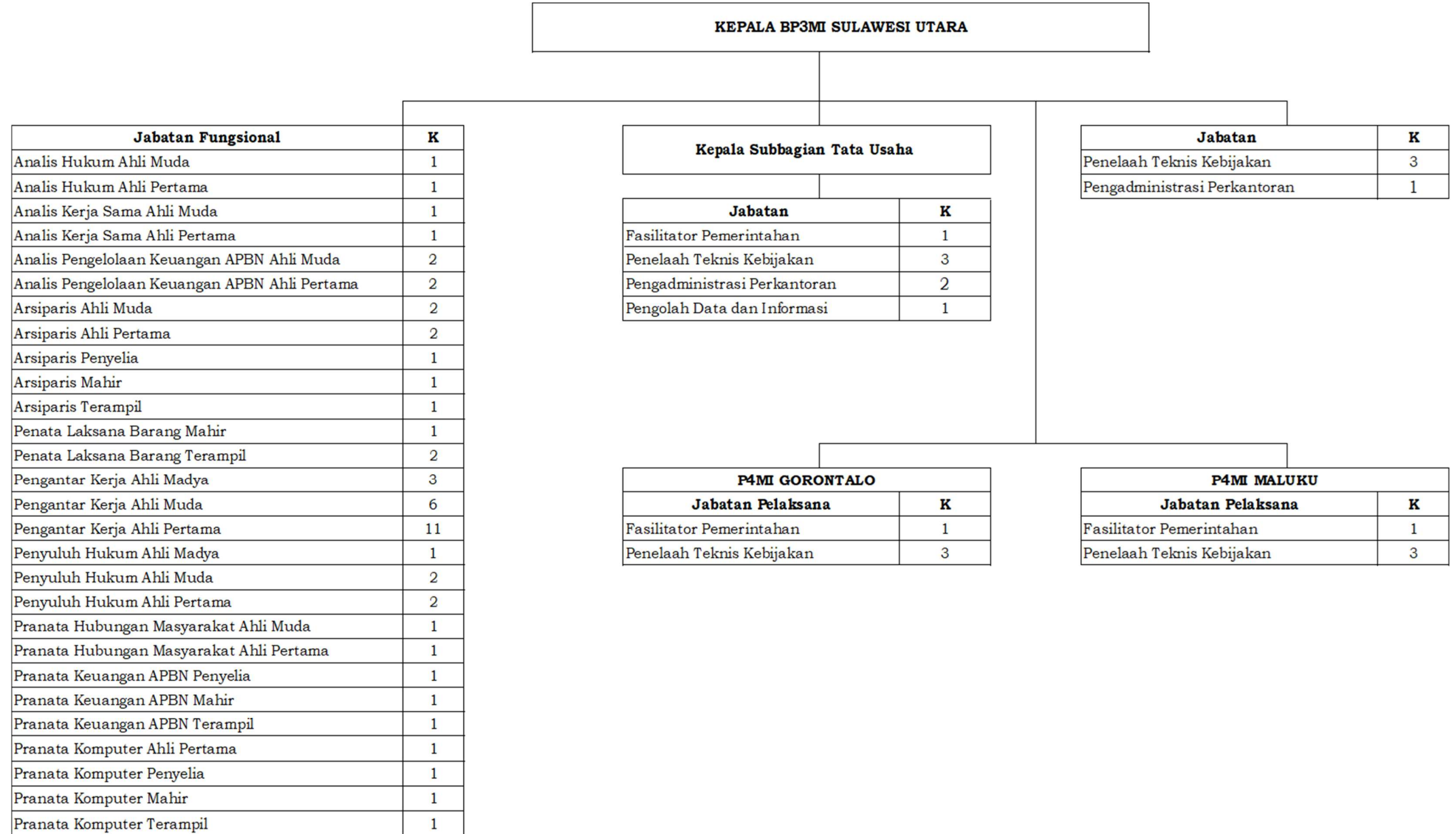
R. BP3MI KALIMANTAN BARAT



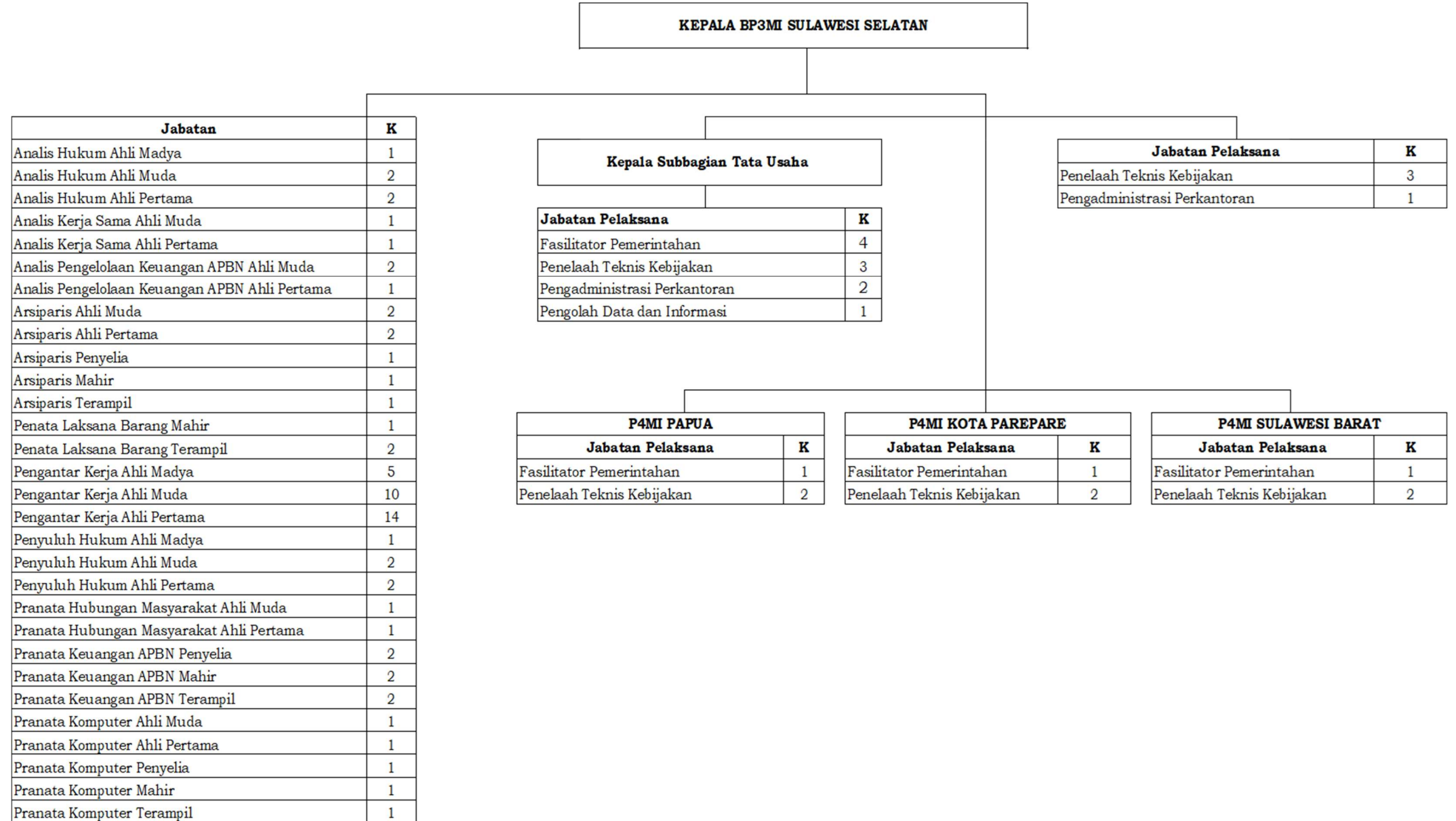
S. BP3MI KALIMANTAN UTARA



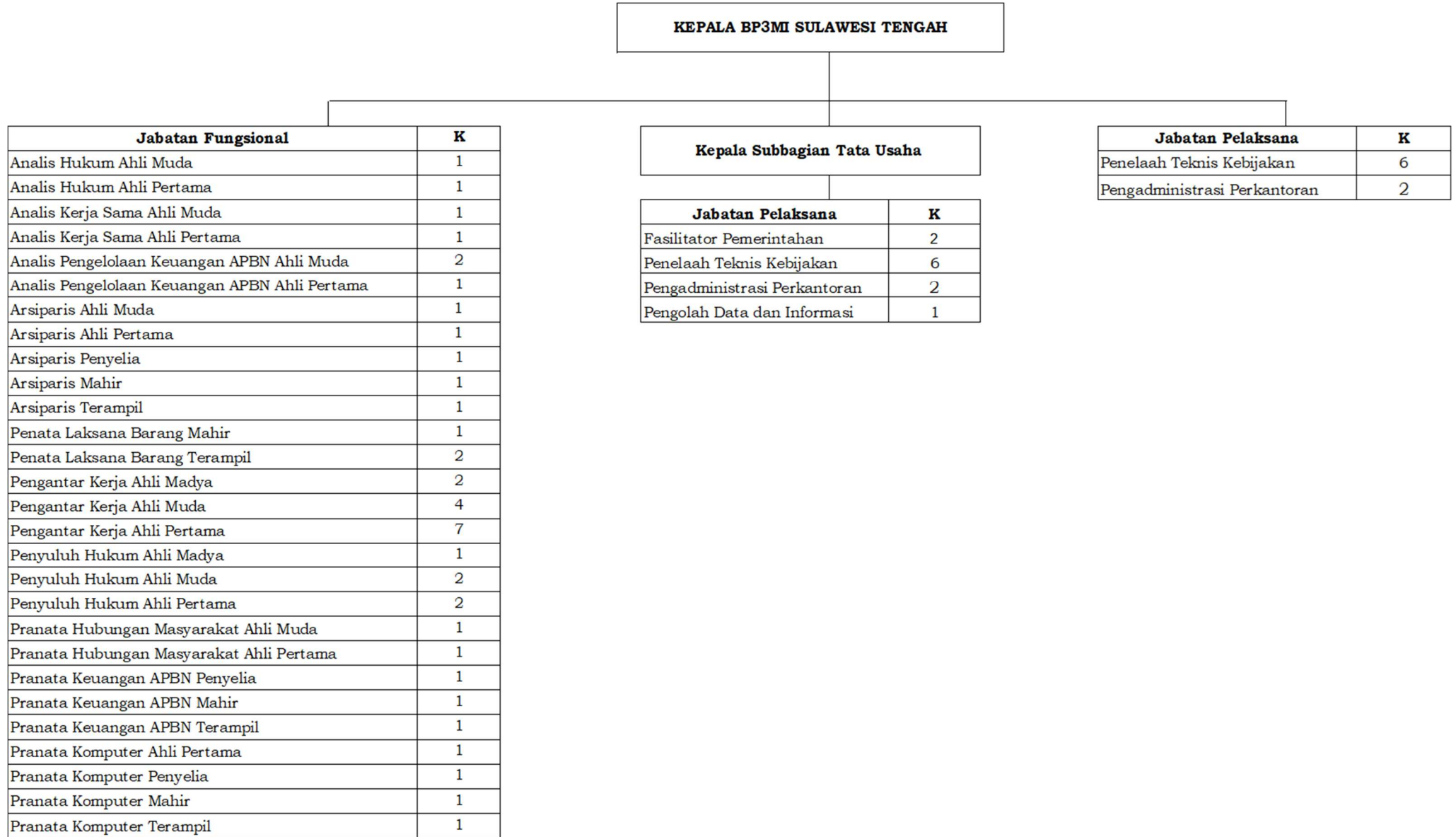
T. BP3MI SULAWESI UTARA



U. BP3MI SULAWESI SELATAN



V. BP3MI SULAWESI TENGAH



W. BP3MI SULAWESI TENGGARA



MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,



MUKHTARUDIN